

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmatNya, Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 ini dapat tersusun dengan baik. Laporan ini berisi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah beserta hasil-hasil yang telah dicapai dan permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu 2008.


Sangat disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya serta belum dapat menginformasikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, dengan terselesaikannya Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperkaya informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan di sektor kelautan dan perikanan Jawa Tengah, yang sekaligus juga sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Mudah-mudahan, apa yang tertuang didalamnya dapat bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih.

Semarang, September 2009

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah



Ir. SUBAGYO, M.M
Pembina Tingkat I

NIP. 500 068 479 / 19560204 198502 1 001



4 PENDAHULUAN

Dampak arus globalisasi yang makin meluas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, serta karakteristik sumberdaya kelautan dan perikanan, akan berpengaruh pula pada pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak dapat dilepaskan dan harus mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Sektor kelautan dan perikanan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sektor lain, khususnya sumberdaya perikanan laut yang pada hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Sumberdaya perikanan laut tropis memiliki banyak spesies yang relatif terbatas jumlahnya.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kedepan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi / lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Di sisi lain, pembangunan kelautan dan perikanan Jawa Tengah masih memerlukan perhatian seperti rendahnya eksploitasi sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa, belum optimalnya pemanfaatan perairan ZEE di Selatan Jawa Tengah,

belum dimanfaatkannya berbagai organisme laut sebagai sumber bahan industri biofarmasi, kimia, pertanian maupun jasa lingkungan dan belum optimalnya waduk/bendungan sebagai lahan budidaya ikan dan penangkapan.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah, maka digunakan landasan dan pedoman Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005. Dengan mempertimbangan latar belakang kondisi faktual dan keterkaitan antar masalah serta tantangan yang dihadapi serta berbagai butir agenda kebijaksanaan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka prioritas pembangunan perikanan dan kelautan di Jawa Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- (a) Pembangunan dan pengembangan perikanan budidaya
- (b) Penguatan dan pengembangan perikanan tangkap
- (c) Pengembangan Agrobisnis

2 KEADAAN UMUM

2.1. KEADAAN ALAM DAN IKLIM

2.1.1. Letak

Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5° 30' LS - 8° 30' LS dan 108° 30' BT - 111° 30' BT, dengan jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk pulau Karimunjawa).

2.1.2. Batas dan Luas Wilayah

Sebelah Utara : Laut Jawa

Dimana terdapat Kabupaten/Kota antara lain :
Kabupaten Brebes, Tegal, Kota Tegal,
Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan,
Kabupaten Batang, Kendal, Kota Semarang,
Kabupaten Demak, Jepara, Pati dan Kabupaten
Rembang.

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia dan Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Kabupaten Cilacap,
Kebumen, Purworejo, Magelang, Klaten dan
Kabupaten Wonogiri.

Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur

Diperbatasan sebelah timur terletak Kabupaten Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri.

Sebelah Barat : Provinsi Jawa Barat.

Diwilayah perbatasan sebelah barat ini terdapat Kabupaten Brebes dan Cilacap.

Panjang pantai dari utara sampai dengan selatan Jawa Tengah dengan panjang garis pantai 828,82 km, yang terdiri dari 540,27 km adalah panjang garis pantai utara dan 288,55 km merupakan panjang garis pantai selatan, dengan luas kawasan pesisir sebesar 122.739,79 Ha.

2.1.3. Topografi dan Jenis Tanah

Dari segi topografi terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah perbukitan dengan pegunungan yang landai dan curam.

Berdasarkan letak ketinggian tempat dari permukaan laut dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) klasifikasi yaitu :

- Ketinggian dari 1 – 100 meter, meliputi 53,3 %
- Ketinggian dari 100 – 500 meter, meliputi 27,4 %
- Ketinggian dari 500 – 1000 meter, meliputi 14,7 %
- Ketinggian dari 1000 meter keatas, meliputi 4,6 %

Berdasarkan derajat kemiringan dikelompokkan kedalam 4 (empat) kelompok yaitu :

- Derajat kemiringan dari 0° – 2° meliputi 41,3 %
- Derajat kemiringan dari 2° – 15° meliputi 27,7 %
- Derajat kemiringan dari 15° – 40° meliputi 21,2 %
- Derajat kemiringan dari 40° keatas meliputi 9,8 %

Jenis tanah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah meliputi :

a) Tanah Latosol

Jenis tanah ini memiliki sifat tanah yang agak asam, dengan warna tanah kuning, coklat atau merah agak peka terhadap erosi. Jenis tanah ini terdapat di daerah Kabupaten Brebes, Banyumas, daerah Kedu sampai Lawu dengan prosentase mencapai 9 % dari wilayah Jawa Tengah.

b) Tanah Aluvial

Jenis tanah aluvial berwarna kelabu, Coklat sampai hitam yang tidak peka terhadap erosi, dimana proses pembentukan tanahnya dari endapan laut, sungai dan danau yang terdapat di daerah pantai Utara dan pantai Selatan dan prosentase jenis tanah Aluvial ini mencapai 29 %.

c) Tanah Grumusol

Proses pembentukan tanah grumasol sebagai akibat endapan tanah liat dan bekuan yang bersifat netral, dengan warna tanah dari merah hingga coklat sehingga baik untuk lahan pertanian, Jenis tanah ini terdapat di daerah datar dan bergelombang dengan daerah disebelah Timur dan Tenggara. Prosentase jenis tanah Grumusol mencapai 13,5 %.

d) Tanah Regosol

Jenis tanah Regosol proses pembentukan tanahnya dari batuan kapur, batuan beku dan pasir pantai dengan sifat kimiawinya asam sampai netral, dengan warna tanah berwarna coklat kekuning-kuningan, dari warna coklat sampai kelabu dan tersebar didaerah perbukitan, pegunungan kapur sepanjang Kabupaten Grobogan sampai dengan Wonogiri. Prosentase jenis tanah Regosol mencapai 20,5 %.

e) Tanah Mediteran Merah Kuning

Proses pembentukan tanah ini dari endapan batuan kapur, Intermedior dan batuan Metafort, dengan warna merah sampai kecoklat-coklatan dengan penyebarannya membujur dari pegunungan Kedu sampai ketimur pegunungan Lawu. Prosentase jenis tanah Mediteran Merah Kuning ini mencapai 3 %.

f) Tanah Litasol

Proses pembentukan tanah ini dari batuan beku dan batuan endapan, dengan sifat aneka ragam dan berwarna kecoklat-coklatan, jenis tanah ini sangat baik untuk lahan pertanian. Prosentase tanah Litasol ini mencapai 9 %.

g) Tanah Andosol

Proses pembentukannya dari batuan beku basis dan Intermedior yang bersifat peka terhadap erosi dengan warna tanahnya kelabu, coklat. Prosentase jenis tanah Andosol mencapai 14 %.

h) Tanah Hidromorf

Proses pembentukan tanah ini dari batuan endapan tanah liat, dengan sifat tanahnya tidak peka terhadap erosi, dijumpai di daerah sepanjang kabupaten Kudus, Rembang hingga Blora.

i) Tanah Podsolik Kuning

Proses pembentukannya dari batuan endapan dan bekuan dengan warna kuning sampai merah dan sifat tanah ini bersifat asam yang dapat dijadikan lahan pertanian, perkebunan, dan daerah penyebarannya di daerah Purwokerto dan Purworejo.

2.1.4. Iklim

Jawa Tengah memiliki iklim tropis dengan musim penghujan dan kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Suhu bulanan minimum 21,3° C dan suhu maksimum 30,7° C dengan kelembaban rata-rata 24,7 %. Jumlah curah hujan dalam setahun berkisar 1.547 – 3.989 mm/tahun, sehingga tergolong daerah yang beriklim basah. Umumnya curah hujan tersebut terbagi tidak merata sepanjang tahun dimana pada bulan-bulan tertentu curah hujannya cukup banyak seperti antara bulan Oktober sampai bulan Maret, dimana pada bulan-bulan tersebut hari hujan lebih dari 10 (sepuluh) hari hingga 22 hari. Curah hujan agak berkurang yang dimulai pada bulan April sampai September. Dengan demikian dalam periode satu tahun terbagi 2 (dua) musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

2.2. PENDUDUK

Peningkatan jumlah penduduk Tahun 2008 dibandingkan dengan Tahun 2007 mengalami peningkatan 0,76%, dimana perkembangan jumlah penduduk selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2004 – 2008

Tahun	Jumlah Penduduk (Orang)	%
2004	32.397.431	
2005	32.908.850	1,58
2006	32.177.730	-2,22
2007	32.380.279	0,63
2008	32.626.390	0,76

Sumber : BPS Jawa Tengah

Dari jumlah penduduk Tahun 2008 sebanyak 32.626.390 orang tersebut yang bergerak dibidang perikanan adalah 848.257 orang atau 2,60%, dengan perincian seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Yang Bergerak Dibidang Perikanan Tahun 2004 – 2008

Tahun	Nelayan		Pembudidaya				Jumlah	%
	Perairan Umum	Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Sawah		
2003	37.801	167.072	121.790	496.356	5.680	49.582	878.281	
2004	31.266	172.418	121.795	481.089	5.894	47.268	859.730	-2,11
2005	30.720	191.968	123.195	475.875	4.352	46.514	872.624	1,50
2006	22.315	144.858	123.835	481.203	4.386	58.154	834.751	-4,34
2007	30.722	168.115	116.197	475.877	4.354	46.516	841.781	0,84
2008	31.029	168.199	117.475	480.636	4.398	46.521	848.257	0,77

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

2.3. POTENSI SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN JAWA TENGAH

Sumber daya perikanan dan kelautan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu Sumber Daya Alam Hayati

(SDAH) dan Sumber Daya Alam Nirhayati (SDAN). Sumber daya alam hayati utamanya berupa sumber daya ikan (dalam arti luas sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan), yang memiliki arti penting bagi kegiatan perikanan, konservasi, dan preservasi lingkungan perairan air tawar, pesisir dan lautan, serta wisata bahari; sedangkan sumber daya alam nirhayati (SDAN) terdiri dari unsur pertambangan dan energi (minyak dan gas bumi serta mineral), unsur jasa kelautan seperti perhubungan laut dan angkutan laut, unsur industri dan bangunan kelautan. Potensi sumber daya perikanan dan kelautan akan dititikberatkan pada potensi sumber daya alam hayati di perairan umum dan di perairan Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah.

a. Potensi Perikanan Air Tawar

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi perairan umum dengan luas 41.807 Ha, yang terdiri dari waduk (22.999 Ha), sungai (15.059,9 Ha), rawa (3.673 Ha), dan danau (75,4 Ha). Dari 37 buah waduk yang ada, terdapat waduk-waduk besar yang sangat potensial, yaitu Waduk Gajahmungkur (Kab. Wonogiri), Waduk Wadaslintang (Kab. Wonosobo), Waduk Mrica (Kab. Banjarnegara), dan Waduk Kedung Ombo (Kab. Sragen, Boyolali, dan Grobogan). Pada waduk-waduk besar tersebut telah berkembang budidaya ikan di karamba jaring apung dengan komoditas unggulan yang bervariasi.

Potensi perairan tawar yang sangat besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, bila ditinjau dari kondisi agroklimatnya sangat mendukung untuk dikembangtingkatkannya budidaya ikan dalam karamba jaring apung. Namun demikian kontribusi produksi budidaya ikan dalam karamba jaring apung terhadap total produksi budidaya ikan air tawar di Jawa Tengah sudah cukup baik, berkisar antara 30 hingga 40 % per-tahun.

Ditinjau dari produksi waduk yang dihasilkan dari Tahun 2005 – 2008, yaitu 6.737,30 ton dengan nilai Rp 53.262.046,00 pada tahun 2005 dan terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan, hingga pada Tahun 2008 produksi meningkat menjadi sebesar 9.862,40 ton dengan nilai Rp. 100.692.462,00, rata-rata peningkatan sebesar 35,97% per-tahun dan nilainya sebesar 44,09% per-tahun.

b. Potensi Perikanan Air Laut

Ada sepuluh kelompok jenis ikan, yaitu : (1) pelagis besar, (2) pelagis kecil, (3) demersal, (4) ikan karang, (5) ikan hias, (6) udang dan krustasea lainnya, (7) kekerangan, moluska, dan teripang, (8) mamalia dan reptilia, (9) rumput laut, dan (10) benih alam komersial.

Hasil re-evaluasi potensi sumber daya ikan laut oleh Komisi Nasional Pengkajian Stock Sumberdaya Ikan Laut pada Tahun 1998, diperoleh angka potensi sumber daya ikan di Laut Jawa dan Samudera Hindia Selatan Jawa sebagai berikut :

a. Laut Jawa

- Tongkol : 29.000 ton;
- Tenggiri : 26.000 ton;
- Pelagis Kecil : 340.000 ton;
- Demersal : 431.000 ton;
- Udang : 11.000 ton;
- Lobster : 500 ton;
- Cumi-cumi : 5.042 ton;
- Ikan Karang : 4.973 ton;

b. Jumlah : 843.515 ton.

c. Samudera Hindia Selatan Jawa

- Tuna Besar : 22.000 ton;
- Cakalang : 25.000 ton;
- Tongkol : 18.000 ton;

- Tenggiri : 10.000 ton;
- Setuhuk dll : 5.000 ton;
- Pelagis Kecil : 430.000 ton;
- Demersal : 135.000 ton;
- Udang : 11.000 ton;
- Lobster : 1.600 ton;
- Cumi-cumi : 2.413 ton;
- Ikan Karang : 6.227 ton;
- **Jumlah** : **662.588 ton**

Apabila diasumsikan bahwa untuk Jawa Tengah potensinya adalah sepertiga dari potensi total tersebut di atas, maka potensi sumber daya ikan Laut Jawa Utara Jawa Tengah adalah sebesar 281.171,7 ton/tahun, dan Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah adalah sebesar 221.862,7 ton/tahun.

Jika dibandingkan dengan rata-rata produksi Tahun 1997 hingga 1999, maka tingkat pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada Pantai Utara, dengan potensi 281.171,7 ton dan tingkat produksi rata-rata 274.478,0 ton/tahun, maka tingkat pemanfaatan potensinya sebesar 97,62 %.
- Pada Pantai Selatan, dengan tingkat potensi 221.862,7 ton dan tingkat produksi rata-rata 24.391,8 ton/tahun, maka tingkat pemanfaatan potensinya sebesar 10,99 %.

Dari data di atas, diketahui bahwa telah terjadi kejenuhan di Pantai Utara Jawa Tengah yang sudah padat usaha, sehingga perlu optimalisasi dan rasionalisasi, sedangkan di Pantai Selatan Jawa Tengah masih terbuka peluang pengembangannya.

c. **Potensi Budidaya Laut**

Budidaya laut merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan yang cukup penting.

Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Perikanan (1997) bahwa Jawa Tengah memiliki potensi lahan budidaya laut untuk ikan kakap, kerapu, teripang dan rumput laut.

Menurut Direktorat Bina Sumber Hayati, Dirjen Perikanan (1991), potensi budidaya laut Jawa Tengah adalah 3.500 Ha untuk kekerangan, dan 500 Ha untuk rumput laut. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 524/128/1983, lokasi budidaya laut adalah di sepanjang Pantai Jawa Tengah bagian Utara dan Selatan, dan untuk pertama kali ditetapkan : (a) Perairan Pantai Kabupaten Jepara termasuk Pulau Panjang, (b) Perairan pada gugusan pulau-pulau Karimunjawa, (c) Perairan Pantai Kabupaten Rembang, (d) Perairan Pantai Kabupaten Kebumen, sepanjang tidak dipergunakan untuk kepentingan sektor industri, HANKAM, dan Perhubungan.

Sampai saat ini, budidaya laut di Jawa Tengah belum berkembang, oleh karena itu perlu peningkatan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologinya dan menarik investor untuk berusaha di bidang tersebut.

d. Potensi Budidaya Pesisir (Tambak)

Lokasi budidaya air payau berada di sepanjang pantai utara Jawa Tengah dengan garis pantai sepanjang \pm 453,9 km yang membentang dari Kabupaten Brebes samapai Rembang serta sebagian kecil di pantai selatan, dengan luas total pengusahaan \pm 38.910 ha (tahun 2005). Bebearapa komoditas yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain: udang windu, udang putih, udang vannamae, kepiting, kerapu serta rumput laut.

Lahan utama yang potensial bagi pengembangan usaha pertambakan terletak di daerah hutan bakau. Namun demikian pembukaan hutan bakau untuk tambak harus memperhatikan prinsip kelestarian sumber dan keseimbangan ekologi perairan tidak terganggu.

Lahan budidaya pesisir yang tersedia diperkirakan mencapai 40.000 ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan dan yang memproduksi saat ini hanya 38.910 ha. Dengan demikian masih terdapat 2,72% lahan yang tersedia yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya tambak.

e. Potensi Ekosistem Habitat Vital

Ekosistem habitat vital bagi biota perairan pesisir dan laut di Jawa Tengah yang berfungsi sebagai spawning ground, nursery ground dan feeding ground seperti mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagian besar kondisinya telah dalam keadaan mengkhawatirkan. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa jumlah hutan bakau yang terdata seluas 1.829,62 ha; yang berada di pantai utara seluas 1.825,62 ha; sedangkan jumlah luasan hutan bakau di wilayah selatan terdata 4,00 ha (Kabupaten Kebumen). Habitat padang lamun lain hanya berada di wilayah perairan Jepara seluas 39,25 ha, sedangkan di wilayah lain belum terdata. Habitat terumbu karang yang ada di Jawa Tengah terdata seluas 1.283,34 ha yang berada di wilayah perairan sekitar Demak 0,39 ha; Jepara 744,15 ha; Pati 65,00 ha; Rembang seluas 224,80 ha; dan Kabupaten Batang seluas 249,00 ha. Wilayah perairan lain yang ditengarai terdapat habitat terumbu karang yang belum terdata dimungkinkan berada di perairan sekitar Semarang, Kendal, Tegal dan wilayah pantai selatan.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, bahwa untuk melindungi fungsi pesisir/pantai diperlukan kawasan sabuk hijau dengan ketetapan selebar 130 x beda pasang naik tertinggi dengan pasang surut terendah atau diestimasikan rata-rata selebar 200 meter. Untuk dapat mewujudkan pengelolaan pesisir yang lestari, maka sesuai dengan panjang pantai Jawa Tengah memerlukan kawasan sabuk hijau sekitar 14.242,20 ha (diasumsikan yang 10% dimanfaatkan sebagai ruang public) yang terdiri atas 9.039,00 ha disepanjang pesisir utara dan 5.203 ha disepanjang pesisir selatan Jawa Tengah.

Kondisi hutan mangrove yang ada di Jawa Tengah sebagian besar dalam keadaan kritis, dimana dari luasan 1.829,62 ha yang dalam kondisi baik hanya 606,60 ha atau 33,15% dan selebihnya 1.219,00 ha atau 66,85% dalam kondisi kritis dan memerlukan perhatian serius. Untuk dapat memenuhi standar Keppres No. 32 Tahun 1990 masih diperlukan luasan hutan bakau seluas 13.635,58 ha yang dibagi di pesisir utara seluas 8.432,38 ha dan pesisir selatan 5.203,20 ha. Jika dikonversikan dalam jumlah pohon bakau yang harus ditanam (jarak tanam 0,5 m) maka diperlukan bibit bakau sekitar 550.911.268 batang yang peruntukan di pesisir utara sekitar 340.696.785 batang dan untuk pesisir selatan Jawa Tengah diperlukan sekitar 210.214.483 batang.



TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur No. 80 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
 3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan perikanan;
 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
 6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Struktur Organisasi

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh struktur/susunan organisasi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin tugas pokok dan fungsi, sebagaimana tersebut di atas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1.A. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program;
- 1.B. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- 1.C. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- 1.D. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

1. Subbagian Program:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

2. Subbagian Keuangan:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

C. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bina Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan; serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan rencana dan program Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis kegiatan Bina Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan; serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama kegiatan Bina Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan; serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bina Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan; serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahkan:

1. Seksi Bina Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pesisir laut dan pulau-pulau kecil, meliputi:

- Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan tata ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah laut kewenangan provinsi;

- Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa, dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi;
- Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi;
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Seksi Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi, pengendalian ekosistem dan sumberdaya kelautan, meliputi:

- Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;
- Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi, rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi;

- Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi dan lingkungan sumberdaya ikan di wilayah kewenangan provinsi;
- Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan jasa kelautan, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan;
- Pelaksanaan pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota;
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan perijinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi;
- Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

D. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap, sarana perikanan tangkap dan pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perikanan tangkap;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:

1. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap, meliputi:

- Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi;
- Penetapan petunjuk pembangunan tipe pelabuhan perikanan, penyusunan data fasilitas pelabuhan perikanan Jawa Tengah (fasilitas pokok, fungsional dan penunjang);
- Penetapan petunjuk pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah;
- Inventarisasi data kebutuhan pengembangan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan analisa data kebutuhan pengembangan pelabuhan perikanan;
- Usulan rencana pengembangan pelabuhan perikanan jangka pendek dan jangka panjang;
- Penyusunan rencana pembangunan pelabuhan perikanan;

- Evaluasi pelaksanaan pengembangan pelabuhan perikanan;
- Inventarisasi dan evaluasi lokasi pelabuhan perikanan yang akan diidentifikasi;
- Usulan tata cara identifikasi pembangunan pelabuhan perikanan;
- Analisis dan evaluasi kegiatan identifikasi pengembangan pelabuhan perikanan;
- Analisis dan evaluasi usulan rencana induk pengembangan pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan pengembangan pelabuhan perikanan;
- Analisis lokasi / *site* pelabuhan perikanan yang akan dibangun;
- Usulan kerangka acuan studi kelayakan dan studi teknis pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep tata cara pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan bahan supervisi pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan bahan analisa dan evaluasi studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep usulan pentahapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan;
- Usulan kerangka acuan rancang bangun pelabuhan perikanan;
- Usulan tata cara pelaksanaan pembuatan rancang bangun pelabuhan perikanan yang akan dibangun;
- Penyusunan bahan supervisi pelaksanaan pembuatan rancang bangun pembangunan pelabuhan perikanan;
- Analisis dan evaluasi hasil pembuatan rancang bangun pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep rencana pentahapan pelaksanaan konstruksi pelabuhan perikanan;
- Bimbingan pelaksanaan rancang bangun pelabuhan perikanan;
- Pengumpulan data/informasi serta penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan;

- Penyusunan laporan hasil pembangunan pelabuhan perikanan;
- Pemantauan pelaksanaan pelayanan teknik pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan petunjuk persiapan operasional pelabuhan perikanan;
- Usulan bimbingan pelaksanaan operasional pelabuhan perikanan;
- Evaluasi dan analisis kegiatan operasional pelabuhan perikanan;
- Usulan tata cara kerjasama operasional pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep usulan perjanjian kerjasama operasional pelabuhan perikanan;
- Penyusunan bahan informasi/data pembangunan dalam rangka promosi investasi dan kerjasama operasional pelabuhan perikanan;
- Pengusulan tata cara pemantauan operasional pelabuhan perikanan;
- Penyusunan bahan evaluasi operasional pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep pelaporan pengelolaan pelabuhan perikanan;
- Pemantauan pemanfaatan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan.

2. Seksi Sarana Perikanan Tangkap:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perikanan tangkap, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
- Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT s.d. 30 GT;
- Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat tangkap ikan;
- Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan;
- Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT s.d. 30 GT;
- Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpun di perairan laut kewenangan provinsi;
- Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;

- Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.

3. Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Sumber daya Ikan:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan, meliputi:

- Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi;
- Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota;
- Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi;
- Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi;
- Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar kabupaten/kota;
- Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi.

E. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, pengelolaan budidaya air payau dan laut, serta pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air payau dan laut;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Budidaya Air Tawar:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan produk perikanan di air tawar;
- Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar;
- Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan air tawar;
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan air tawar;
- Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk /benih ikan air tawar;
- Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk per jenis, induk dasar dan benih alam air tawar;
- Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan air tawar;
- Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan air tawar;
- Pembinaan pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan air tawar;

- Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya air tawar.

2. Seksi Pengelolaan Budidaya Air Payau dan Laut:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan produk perikanan di air payau dan laut;
- Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air payau dan laut;
- Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan air payau dan laut;
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan air payau dan laut;
- Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk /benih ikan air payau dan laut;
- Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk perjenis, induk dasar dan benih alam air payau dan laut;
- Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan air payau dan laut;
- Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan air payau dan laut;
- Pembinaan pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan air payau dan laut;
- Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya air payau dan laut.

3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
- Pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan biologis dan pakan ikan;

- Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor-impor induk dan benih ikan;
- Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan air tawar;
- Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, peredaran dan/atau pemeliharaan ikan lintas kabupaten/kota;
- Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
- Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota;
- Koordinasi dan pengembangan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan;
- Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota;
- Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung (KJA) di perairan umum (PU) lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi;
- Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

F. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha perikanan, pengolahan hasil dan pemasaran, dan pengembangan SDM serta kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha perikanan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil dan pemasaran;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan Kelembagaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha perikanan, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi;
- Pemberian ijin penangkapan dan / atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT s.d. 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan skala menengah yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.

2. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil dan pemasaran, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan;
- Pelaksanaan kebijakan mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai dengan prinsip PMMT atau HACCP;
- Pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi;
- Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan;
- Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya, serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan;
- Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan;
- Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi;
- Akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.

3. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan, meliputi:

- Penetapan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan usaha kelautan dan perikanan di provinsi;

- Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi;
- Peragaan penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan;
- Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistikserta informasi bidang perikanan diwilayah laut kewenangan provinsi;
- Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

G. UPTD- LPPMHP

UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Semarang;**
- Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Pekalongan;** dan
- Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Cilacap.**

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan serta pengawasan pengolahan hasil perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-LPPMHP mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kegiatan pengujian mutu hasil perikanan;
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana untuk pengujian mutu hasil perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

Struktur Organisasi UPT sebagai berikut:

- a. Kepala Laboratorium;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian; dan
- d. Seksi Pengawasan Mutu.

Penjabaran tugas UPT-UPT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

- Penyiapan bahan rencana dan program kerja;
- Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup Laboratorium;
- Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup Laboratorium;
- Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan Laboratorium; dan
- Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan Laboratorium.

b) Seksi Pengujian

- Penyusunan rencana dan program kegiatan pengujian mutu hasil perikanan;
- Penyusunan perencanaan kebutuhan perangkat keras dan lunak untuk program pengujian mutu hasil perikanan;
- Penyiapan dan pengumpulan data serta bahan untuk pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan;
- Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan secara mikrobiologi, organoleptik dan kimia;

- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan pengujian mutu terhadap produk pengolahan;
- Pemeliharaan dan perawatan, bahan kimia dan media pengujian;
- Pelaksanaan fungsi Manajerial Teknis sesuai SNI 19-17025-2000 (ISO Guide 17025) sebagai laboratorium terakreditasi; dan
- Pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar.

c) Seksi Pengawasan Mutu

- Pengumpulan dan inventarisasi data usaha pengolahan hasil perikanan tradisional maupun modern;
- Pelaksanaan pengawasan pada unit usaha pengolahan hasil perikanan tradisional dan modern;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala pada unit usaha pengolahan hasil perikanan tradisional dan modern;
- Pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh pengujian; dan
- Pelaksanaan fungsi Deputy Manajerial Mutu sesuai SNI 19-17025-2000 (ISO Guide 17025) sebagai laboratorium terakreditasi.

H. UPTD-PPP

Unit Pelaksana Teknis - PPP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal;**
- b. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Kab. Pati;**
- c. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak Kab. Demak;**
- d. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto Kab. Pekalongan;**
- e. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asemtoyong Kab. Pemalang;**
- f. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor Kab. Batang;**
- g. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kab. Rembang;**
- h. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang Kab. Kendal; dan**
- i. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa Kab. Jepara.**

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayah kerjanya
2. Pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-PPP mempunyai fungsi :

1. Perencanaan pengembangan, pemeliharaan serta pemanfaatan sarana prasarana pelabuhan perikanan;
2. Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan pelabuhan perikanan;
3. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan; dan
4. Melakukan pemberian pelayanan kapal dan keselamatan pelayaran, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Struktur Organisasi UPT sebagai berikut:

1. Kepala Pelabuhan;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Tata Pengusahaan; dan
4. Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran.

Penjabaran tugas UPT-UPT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

- 1) Penyiapan bahan rencana dan program kerja;
- 2) Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup PPP;
- 3) Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan,

keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup PPP;

- 4) Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan PPP; dan
- 5) Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan PPP.

b) Seksi Tata Pengusahaan

- 1) Penyiapan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan;
- 2) Pemeliharaan sarana pelayaran;
- 3) Pelayanan jasa;
- 4) Pengelolaan keamanan;
- 5) Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan;
- 6) Pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan; dan
- 7) Koordinasi pengawasan penangkapan dan mutu hasil perikanan.

c) Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran

- 1) Perencanaan pengembangan pemeliharaan, serta pemanfaatansarana pelabuhan perikanan;
- 2) Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan berupa penerbitan surat ijin berlayar (SIB);
- 3) Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
- 4) Pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemrosesan hasil perikanan;
- 6) Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan pengolahan, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
- 7) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta statistik perikanan;
- 8) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya;
- 9) Pemanfaatan wilayah pesisir dan fasilitas Wisata Bahari; dan
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

I. UPTD-Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan (BBI)

Unit Pelaksana Teknis-BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. **Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar**
- b. **Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut**

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan perbenihan dan budidaya ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-BPBI mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan budidaya ikan;
3. Pelaksanaan fasilitasi teknis unit perbenihan dan budidaya ikan milik rakyat;
4. Penyediaan benih dan calon induk ikan unggul;
5. Pelaksanaan kaji terap teknologi baru perbenihan dan budidaya ikan;
6. Penyediaan dan penebaran benih ikan di perairan umum;
7. Pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan;
8. Pelaksanaan sertifikasi benih dan induk ikan unggul;
9. Pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan dan pengembangan budidaya ikan;
10. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; dan
11. Pengelolaan ketatausahaan.

Struktur Organisasi UPT sebagai berikut:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Teknis; dan
4. Seksi Standarisasi dan Informasi.

Penjabaran tugas UPT-UPT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

- 1) Penyiapan bahan rencana dan program kerja;
- 2) Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup Balai;
- 3) Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup Balai;
- 4) Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan Balai; dan
- 5) Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan Balai.

b) Seksi Pelayanan Teknis

- 1) Pelaksanaan identifikasi pasar/permintaan benih/induk;
- 2) Perencanaan komoditas yang diproduksi secara kualitatif/ kuantitatif;
- 3) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana produksi;
- 4) Penyusunan panduan mutu;
- 5) Pelaksanaan proses produksi dengan mentaati panduan mutu;
- 6) Pelaksanaan audit internal produksi;
- 7) Pelaksanaan proses sertifikasi; dan
- 8) Pelaksanaan pembinaan pembenihan dan budidaya.

c) Seksi Standarisasi dan Informasi

- 1) Identifikasi teknologi perbenihan dan budidaya;
- 2) Pelaksanaan kaji terap teknologi;
- 3) Perumusan hasil kaji terap;
- 4) Sosialisasi pengembangan teknologi;
- 5) Pembinaan pengembangan teknologi di kabupaten/kota; dan
- 6) Perumusan standar teknologi.

J. Balai Karantina dan Kesehatan Ikan

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit serta karantina ikan dalam rangka melindungi sumberdaya ikan dan lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-BKKI mempunyai fungsi :

1. Mengupayakan pencegahan masuk dan keluarnya hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu;
2. Melakukan pengawasan keluar-masuknya ikan;
3. Melakukan pemeriksaan keluar-masuknya ikan;
4. Standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; dan
5. Melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang karantina dan kesehatan ikan.

Struktur Organisasi UPT sebagai berikut:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengawasan; dan
4. Seksi Pengujian.

Penjabaran tugas UPT-UPT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

- 1) Penyiapan bahan rencana dan program kerja;
- 2) Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup Balai;
- 3) Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup Balai;

- 4) Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan Balai; dan
- 5) Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan Balai.

b) Seksi Pengawasan

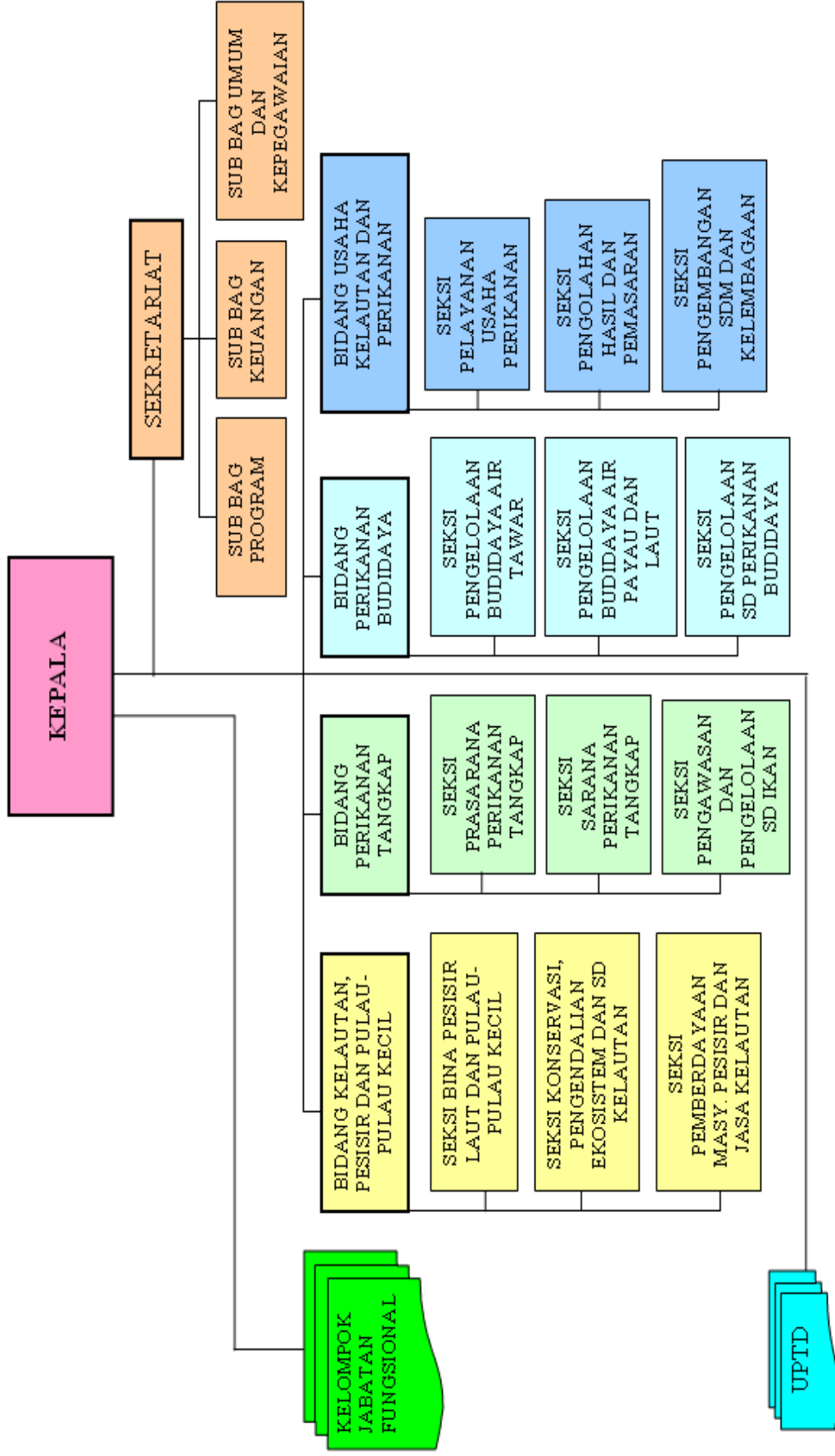
- 1) Pelaksanaan pengendalian penyakit dan pengobatan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan peredaran pestisida, bahan kimia maupun obat-obatan yang digunakan kegiatan perikanan budidaya;
- 3) Penilaian kelayakan Laboratorium Hama Penyakit Ikan;
- 4) Monitoring dan *surveillance* Hama Penyakit Ikan;
- 5) Analisa resiko akibat hama penyakit ikan;
- 6) Pengawasan lalu lintas media pembawa hama penyakit ikan;
- 7) Monitoring residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan ikan; dan
- 8) Pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat (petani, nelayan, siswa/mahasiswa, dll.).

c) Seksi Pengujian

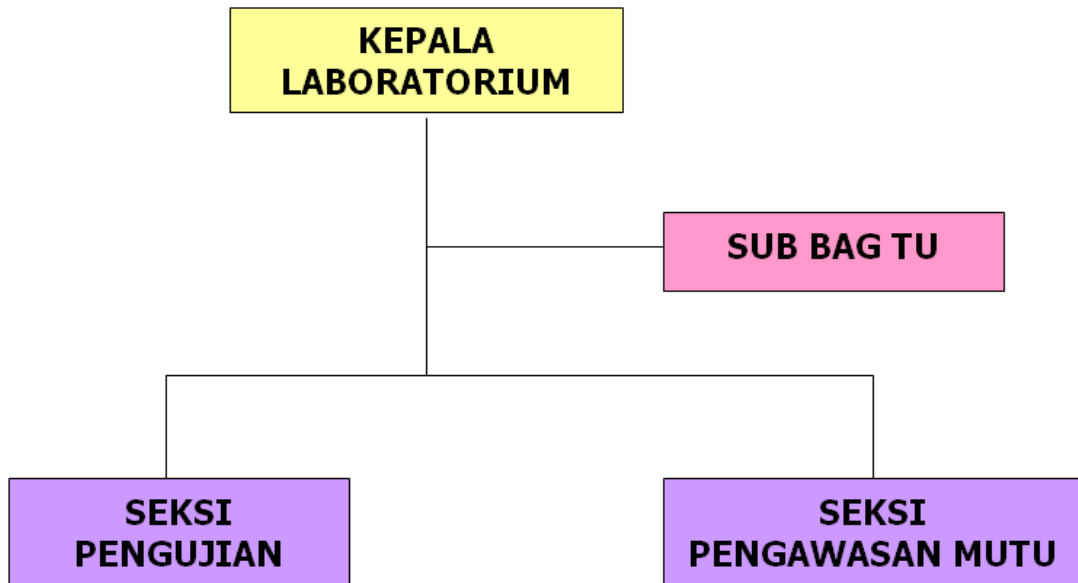
- 1) Penyusunan bahan informasi tentang Penyakit Ikan;
- 2) Visualisasi dan dokumentasi tentang Hama Penyakit Ikan;
- 3) Pengujian obat-obatan ikan;
- 4) Penelitian dan perekayasa di bidang pengendalian Hama Penyakit Ikan;
- 5) Penyusunan konsep naskah perundangan/kebijakan tentang Hama Penyakit Ikan;
- 6) Standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- 7) Sertifikasi kesehatan ikan;
- 8) Analisa dan evaluasi kerugian budidaya akibat Hama Penyakit Ikan;
- 9) Pemeriksaan penyakit ikan (virus, bakteri, parasit, jamur);
- 10) Analisa residu pestisida/obat-obatan dan bahan kimia lainnya; dan
- 11) Penyusunan laporan dan rencana kerja laboratorium.

K. Kelompok Jabatan Fungsional

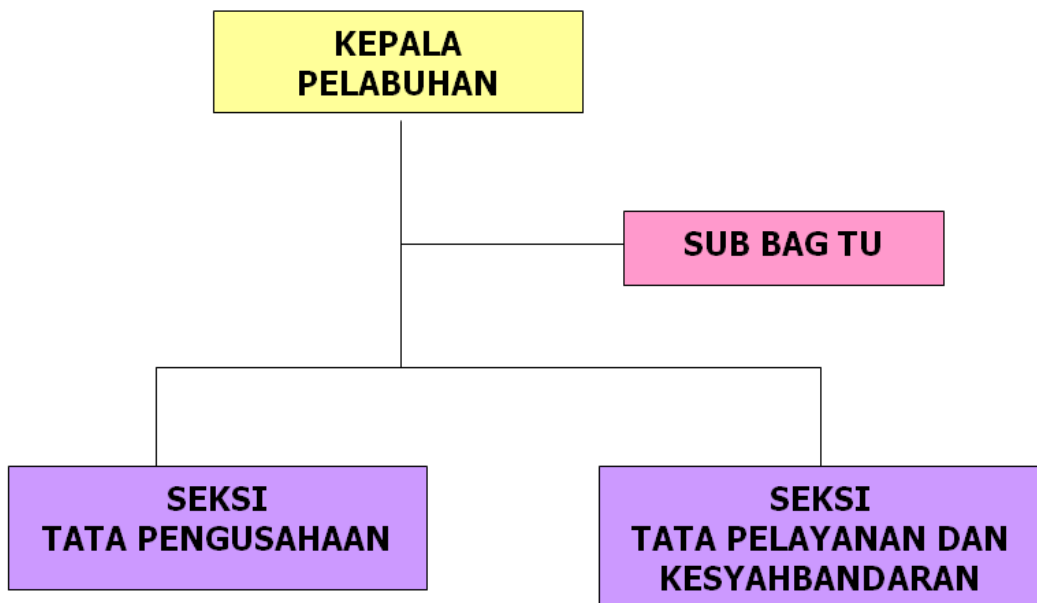
Sekretariat, Bidang-bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Usaha Kelautan dan Perikanan, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :



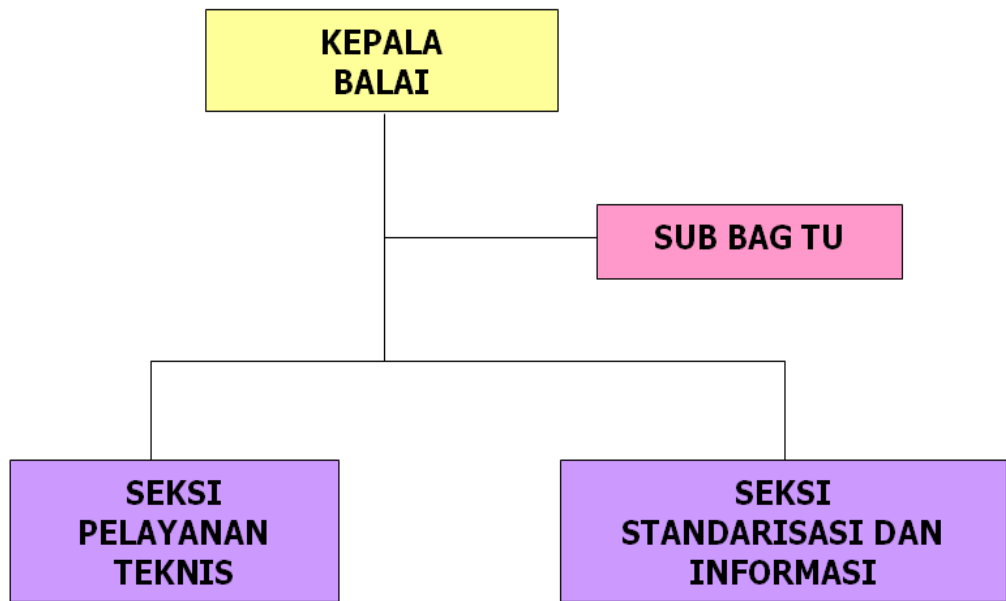
Gambar 2.1. BAGAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH



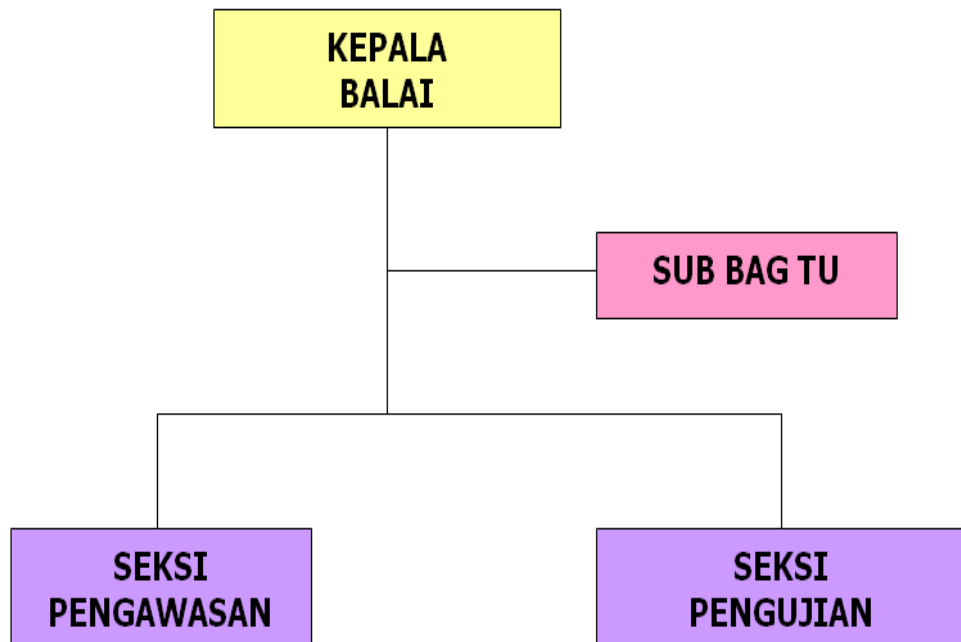
Bagan Organisasi UPT Lab. Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Bagan Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Bagan Organisasi UPT Balai Pembenihan dan Budidaya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Bagan Organisasi UPT Balai Karantina dan Kesehatan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN JAWA TENGAH

4.1. SASARAN PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN JAWA TENGAH

Sasaran pembangunan perikanan adalah : (a) termanfaatkannya potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (b) terbangun, terehabilitasi serta terpeliharanya sarana dan prasarana perikanan; (c) berkembangnya alat tangkap yang sesuai dengan karakteristik daerah *fishing ground* tujuan penangkapan; (d) tersedianya data dan informasi mengenai potensi dan penyebaran sumberdaya perikanan; (e) terciptanya iklim yang kondusif mendorong investasi dan mampu memanfaatkan sumberdaya yang tersedia melalui pengembangan kawasan dan usaha agribisnis perikanan.

4.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN JAWA TENGAH

Kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Tengah lebih ditekankan pada : (a) peningkatan produksi perikanan, agroindustri, sistem distribusi dan perdagangan, pengembangan wilayah, peningkatan kehidupan pembudidaya ikan dan nelayan, optimalisasi investasi perikanan; (b) pengembangan sumberdaya perikanan, yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dana, informasi, dan kelembagaan; (c) peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan melalui

penyediaan sarana dan prasarana pembangunan sistem agribisnis, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumberdaya alam; (d) peningkatan pembangunan kawasan industri perikanan yang dapat meningkatkan nilai tambah/ nilai jual produk olahan hasil perikanan; (e) peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang belum termanfaatkan secara optimal, melalui : peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan, peningkatan penyediaan pangan dan konsumsi masyarakat terhadap sumber protein ikan dan bahan baku industri di dalam negeri serta ekspor, serta peningkatan mutu produksi perikanan.

4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN JAWA TENGAH

Prioritas pembangunan daerah bidang ekonomi perikanan dan kelautan meliputi :

- (a) Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Budidaya,** Program ini bertujuan untuk : Peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan, pembangunan dan pengembangan sistem perbenihan dan budidaya, pengembangan sistem rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya perikanan budidaya, penerapan dan pengembangan teknologi perbenihan dan budidaya ikan, peningkatan kualitas SDM pembudidaya ikan.
- (b) Penguatan dan Pengembangan Perikanan Tangkap,** Program ini bertujuan untuk : Peningkatan pertumbuhan ekonomi produktif yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perikanan tangkap, pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil, penguatan dan pengembangan sarana perikanan tangkap, penguatan Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, dan Tempat Pelelangan Ikan; penerapan pengembangan teknologi penangkapan, pengembangan

statistik dan sistem informasi perikanan, peningkatan kualitas SDM nelayan.

- (c) **Pengembangan Agribisnis**, Program ini bertujuan untuk : Peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan usaha perikanan, pengembangan usaha dan bisnis perikanan, pembangunan dan pengembangan sentra pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, penerapan dan pengembangan teknologi pasca panen peningkatan informasi pasar dan peningkatan kualitas SDM pengolah hasil perikanan.

4.4. PROGRAM PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN JAWA TENGAH

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan ikan dalam jumlah dan mutu yang cukup terjangkau bagi masyarakat melalui rehabilitasi/pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan produksi, produktivitas perbaikan distribusi yang terkait dengan perikanan budidaya, dengan prioritas kegiatan adalah:

- 1) Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan
- 2) Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan
- 3) Pengelolaan informasi dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan
- 4) Peningkatan dan pengembangan perbenihan ikan
- 5) Revitalisasi perikanan budidaya (RPPK)

PROGRAM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

Program ini bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kegiatan perikanan tangkap, melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan
- 2) Kualitas Hasil Tangkapan

- 3) Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap (RPPK)
- 4) Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap
- 5) Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman
- 6) Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Laut
- 7) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha perikanan baik tangkap maupun budidaya dalam rangka menunjang kemandirian pengelolaan perikanan. Program ini dilaksanakan melalui :

- 1) Pengembangan dan Pembinaan Pasca Panen
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan
- 3) Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan
- 4) Peningkatan Pelayanan dalam Rangka Menjaga Mutu Produk
- 5) Bimbingan Teknologi Pengembangan Produk yang Aman dan Berdaya Saing
- 6) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perijinan
- 7) Pengembangan Kawasan Perikanan
- 8) Peningkatan Perencanaan, Pengolahan Data dan Evaluasi Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Sumberdaya Aparatur Diskanlut
- 2) Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan di daerah sesuai dengan analisis keadaan serta kebutuhan melalui pengembangan sistem informasi manajemen berbasis *computerize*, pengadaan sarana kantor pemerintah, pembangunan dan rehabilitasi prasarana gedung kantor pemerintahan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Rehabilitasi gedung kantor UPTD Provinsi Jawa Tengah

PROGRAM PENGENDALIAN EKSPLOKASI DAN EKSPLOITASI SUMBERDAYA KELAUTAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian dan pemulihan kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang sebagai habitat vital. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Penanganan Abrasi dan Pemanfaatan Akresi di Pantura

PROGRAM INVENTARISASI DAN EVALUASI SUMBERDAYA KELAUTAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan basis data potensi sumberdaya kelautan dan kerusakan yang ada serta membangun kapasitas kelembagaan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi, serta pelestarian sumberdaya kelautan. Selain itu juga meningkatkan kegiatan riset dan pengembangan teknologi kelautan dan tingkat penguasaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/terapan bidang kelautan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pesisir. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Identifikasi dan inventarisasi sumberdaya kelautan
- 2) Pengelolaan Basis Data dan Basis Model Habitat Vital Perikanan dan Kelautan Pantura Jawa Tengah

5 PROGRAM/ KEGIATAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEGIATAN / ANGGARAN RUTIN

Belanja Administrasi Umum (BAU)

Anggaran yang tersedia dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin yang ada di Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Tengah, termasuk di dalamnya gaji pegawai dinas. Anggaran rutin ini berasal dari Belanja Administrasi Umum

5.1. REALISASI FISIK dan KEUANGAN

5.1.1. APBD Tahun Anggaran 2008

Anggaran semula sebelum ada anggaran perubahan total anggaran Satuan Kerja Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 sebesar Rp.43.120.464.000,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.29.407.329.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.13.713.135.000,-, setelah ada perubahan anggaran berubah menjadi Rp.43.305.239.000,-, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.14.798.840.000,- dan Belanja Langsung Rp.28.506.399.000,-.

Tabel 3 Anggaran Satuan Kerja Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008

No	Nama Kegiatan	Anggaran Semula (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah (Berkurang) (Rp.)
1	Belanja Langsung	29.407.329.000	28.506.399.000	(900.930.000)
	1.1 Belanja Pegawai	2.971.117.000	2.896.821.000	(74.296.000)

	1.2 Belanja Barang dan Jasa	20.515.412.000	20.477.448.000	(37.964).000
	1.3 Belanja Modal			
	Belanja Tidak Langsung	5.920.800.000	5.132.130.000	(788.670.000)
2	2.1 Belanja Pegawai	13.713.135.000	14.798.840.000	1.085.705.000
		13.713.135.000	14.798.840.000	1.085.705.000
	Total Belanja	43.120.464.000	43.305.239.000	184.775.000

Dalam Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Gaji dan Tunjangan, sedangkan dalam Belanja Langsung digunakan untuk seluruh kegiatan pembangunan pada Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tupoksi yang ada, dengan skala prioritas pada kegiatan yang dapat meningkatkan PAD seperti pengembangan sarana prasarana perikanan laut (TPI/PPI) dan UPT, serta kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat berupa penanggulangan bencana alam gempa bumi di Jawa Tengah, optimalisasi alat tangkap ramah lingkungan untuk nelayan skala kecil, penguatan modal budidaya ikan air tawar dan payau, pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan, bantuan sarana pengolahan hasil perikanan, serta pembinaan nelayan.

Dari seluruh dana Belanja Langsung sebesar Rp. 28.506.399.000,- (Rp.2.896.821.000,- ; Rp.20.477.448.000,- dan 5.132.130.000,-) terserap sebesar Rp.25.773.3377.844,- (90,41%), dengan realisasi fisik 99,83%.

Tabel 4 Realisasi Fisik dan Keuangan Satuan Kerja Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.000.000	37.733.000	89.84	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Alam dan Listrik	813.300.000	778.824.181	95.76	100

3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	1.485.175.000	1.463.366.600	98.53	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	225.000.000	212.844.250	94.60	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
6	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan	167.998.000	164.712.000	98.04	100
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.920.000	37.891.500	99.92	100
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	442.130.000	383.708.000	86.79	100
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	25.500.000	24.934.500	97.78	100
9	Penyediaan Makan Minum				
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi diluar Daerah	25.000.000	11.694.000	46.78	100
10	Jasa Pelayanan Perkantoran	165.463.000	112.741.250	68.14	100
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	738.130.000	737.883.932	99.97	100
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	627.724.000	556.436.000	88.64	100
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	550.000.000	459.860.690	83.61	100
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	460.000.000	450.669.566	97.97	100
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair				
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	408.500.000	408.322.635	99.96	100
17	Pemeliharaan Alat Laboratorium	72.000.000	57.068.000	79.26	100
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Besar dan Berat				

18	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemerintah	25.000.000	23.410.000	93.64	100
19	Pemeliharaan Rutin Ponton/Kendaraan Di atas Air Tidak Bermotor	193.810.000	193.649.000	99.92	100
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	75.000.000	70.590.700	94.12	100
21	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	24.457.500	24.46	100
22	Peningkatan Sumberdaya Aparatur Diskanlut.Prov.Jateng	2.272.443.000	2.156.630.680	94.90	100
23	Asuransi Asset Dinas Perikanan dan Kelautan				
24	Pendidikan Kemasyarakatan				
25	Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Prov.Jateng	100.000.000	29.740.000	29.74	100
26	Peningkatan Sumberdaya Aparatur Diskanlut	195.936.000	183.523.000	93.66	100
27	Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan	69.000.000	68.940.000	99.91	100
28	Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan	218.480.000	208.657.000	95.50	100
29	Kualitas Hasil Tangkapan				
30	Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap (RPPK)	11.000.000	10.850.000	98.64	100
31	Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap	1.420.000.000	1.215.639.000	85.61	90
32	Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman	450.000.000	410.432.000	91.21	100
33	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Laut	100.000.000	100.000.000	100	100
34	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan	200.000.000	159.194.000	79.60	100

31	Kelautan				
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan	328.000.000	241.612.000	73.66	100
32	Budidaya Ikan	250.000.000	226.281.000	90.51	100
33	Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan				
	Pengelolaan Informasi dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	575.000.000	523.634.300	91.07	100
34	Lingkungan				
	Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan	285.000.000	238.132.900	83.56	100
35	Revitalisasi Perikanan Budidaya (RPPK)	400.000.000	358.710.000	89.68	100
36	Pengembangan dan Pembinaan Pasca Panen				
	Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	1.923.340.000	1.402.367.850	72.91	100
37	Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan	120.000.000	120.000.000	100	100
	Peningkatan Pelayanan dalam rangka menjaga Mutu Produk				
38	Bimbingan Teknologi Pengembangan Produk yang Aman dan Berdaya Saing	1.540.550.000	1.264.990.760	82.11	100
39	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perijinan	2.017.000.000	1.822.766.000	90.37	100
40	Pengembangan Kawasan Perikanan				
	Peningkatan Perencanaan, Pengolahan Data dan Evaluasi Perikanan dan Kelautan	510.000.000	498.094.000	97.67	100
41	Pengelolaan Basis Data dan Basis Model Habitat Vital Perikanan dan Kelautan Pantura Jawa Tengah	335.000.000	330.596.000	98.69	100
42	Tengah				

43	Identifikasi dan Inventarisasi Sumberdaya Kelautan	1.685.000.000	1.650.255.000	97.94	100
44	Penanganan Abrasi dan Pemanfaatan Akresi di Pantura	1.670.000.000	1.447.165.750	86.66	100
45	Peningkatan Fishing Ground bagi Nelayan Karimunjawa				
	Peningkatan Lembaga Masyarakat Pesisir	1.261.000.000	1.123.655.800	89.11	100
46	Pemetaan 10 jenis Softcoral sebagai Bahan Biofarmasi	195.000.000	179.496.000	92.05	100
47	Peningkatan Minat Bahari bagi Siswa SD dan SMP Wilayah Pesisir	346.000.000	334.770.000	96.75	100
48	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMP				
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Wilayah Habitat	400.000.000	383.894.000	95.97	100
49		400.000.000	397.820.000	99.46	100
50		300.000.000	291.445.000	97.15	100
51		959.000.000	916.331.000	95.55	100
52		200.000.000	193.165.000	96.58	100
53		200.000.000	194.902.500	97.45	100

54		200.000.000	197.394.000	98.70	100
55		200.000.000	197.829.000	98.91	100
56		150.000.000	148.814.000	99.21	100
57		150.000.000	146.522.000	97.68	100
58		60.000.000	59.159.000	98.60	100
59		30.000.000	29.898.000	99.66	100
		100.000.000	99.234.000	99.23	100

Dari seluruh kegiatan pada Satker Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Tengah hampir seluruh kegiatan terlaksana 100%, dan hampir seluruh dana terserap. Hanya pada kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan fisik tidak tercapai 100% melainkan hanya tercapai 99,83%, hal ini disebabkan oleh adanya pelatihan yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak bisanya penyesuaian jadwal nelayan dengan tentor pelatihan sehingga tidak menggunakan semua dana tersebut. Dengan demikian realisasi fisik maupun keuangan tidak mencapai 100% (keuangan hanya terserap 90,41%).

5.1.2. APBN Tahun Anggaran 2008

Dalam pelaksanaan anggaran APBN pada tahun 2008 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ada 5 (lima) Satuan Kerja, yakni :

- (01) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dengan Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan dengan pagu dana sebesar Rp. 819.396.000,-, dana yang terserap sebesar Rp. 610.264.000,- (74,48%), sedangkan realisasi fisik mencapai 74,48% hal ini disebabkan adanya surat dari Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI no. S-1976/PB/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Penundaan Pencairan Dana DIPA TA.2008 dan Surat baru turun pada bulan Juli 2008 dengan no. Surat S.1913/WPB.13/BD.0202/2008 tentang Penyampaian Copy Revisi I SRAA TA. 2008 sehingga menghambat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Penyerapan Keuangan.
- (03) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dengan Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya, Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan, Pengelolaan Sumberdaya Ikan secara Bertanggung jawab dan Berkelanjutan dan Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data Statistik dan Informasi dengan pagu dana sebesar Rp.5.098.647.000,- dan Rp. 6.312.339.000,- untuk pagu dana Tugas Pembantuan, dana yang terserap sebesar Rp.1.503.150.500,- (40,02%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%, Keuangan tidak terserap 100% karena revisi anggaran yang dibintang baru turun bulan Agustus sehingga tidak memungkinkan proses pengadaan barang/jasa.
- (04) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dengan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir, Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya, Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan, Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi dengan pagu dana sebesar Rp.1.609.500.000,-, dana

yang terserap sebesar Rp.1.308.704.400,- (81,31%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%, Keuangan tidak terserap 100% karena adanya penataan personil dalam rangka implementasi PP 41 dan PP 38 sehingga masih dalam taraf penyesuaian pekerjaan dan dalam rangka mendukung obsesi Gubernur Jateng (Bali Desi Mbangun Deso) yang mengedepankan kegiatan yang berupa bantuan langsung masyarakat agar diutamakan.

- (05) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dengan Kegiatan Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran, Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan secara Bertanggungjawab dan Berkelanjutan dengan pagu sebesar Rp.900.000.000,-, dana yang terserap sebesar Rp.593.698.270,- (65,97%), dengan realisasi fisik mencapai 96,67% hal ini disebabkan adanya surat Seditjen P2SDKP no.01.25.15/P2SDKP0.1/RC 300/1/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Kegiatan yang ditunda/bintang Satker Lingkup P2SDKP Tahun 2008 yang mencantumkan adanya beberapa kegiatan agar tidak dilaksanakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dan ternyata sampai dengan tahun anggaran selesai tidak ada pemberitahuan lebih lanjut.
- (06) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dengan Kegiatan Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran, Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran, Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan, Pengembangan Data dan Statistik Perikanan, Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan, Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan dan Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan dengan pagu dana sebesar Rp.3.582.233.000,- dan Rp.755.000.000,- untuk pagu dana Tugas Pembantuan, dana yang terserap sebesar Rp.3.448.228.300,- (71,78%), dengan realisasi fisik sebesar 100%, hal ini disebabkan adanya sisa anggaran dari kegiatan yang dikontrakkan dan tidak diambil serta adanya kegiatan yang dibintang dan tidak keluar revisinya.
- (07) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan,

Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran, Penyelenggaraan/Peningkatan Akuntansi Pemerintah dan Kekayaan Milik Negara, Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir, Perencanaan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Pengelolaan Batas Wilayah, Pengembangan dan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir, Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan, Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk dengan pagu dana sebesar Rp.2.111.015.000,-, dana yang terserap sebesar Rp.2.049.177.000,- (97,07%), dengan realisasi fisik sebesar 100%.

5.1.3. DAK

Dalam rangka memacu perkembangan pembangunan khususnya dibidang perikanan di kabupaten/kota yang dikategorikan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pemerintah memberikan stimulan. Sejak Tahun 2004 Departemen Keuangan melalui Departemen Perikanan dan Kelautan telah memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan prospektif namun memiliki keterbatasan sumber pendanaan pembangunan. Pada Tahun 2005, DKP mendapatkan alokasi Rp. 322 milyar atau meningkat 5,41% dari Tahun 2004, dengan jumlah penerima 30 kabupaten/kota di 30 Provinsi.

Demikian pula di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi bidang perikanan dan kelautan sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2007. Pada Tahun 2004 dana alokasi khusus non dana reboisasi yang diterimakan untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 18,300 milyar untuk 14 kabupaten/kota, sedangkan untuk Tahun 2005 meningkat sebesar Rp. 29,550 milyar yang diterima untuk 25 kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah. Tahun 2006 dana yang diterima Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 56,160 milyar untuk 35 kabupaten/kota dan Rp. 70,895 milyar untuk 35 kabupaten/kota pada tahun 2007. Pada Tahun 2008 dana yang diterima Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 70,895 milyar untuk 35 kabupaten/kota, dana tersebut langsung ke seluruh kabupaten/kota penerima.

Tabel 5 Dana Alokasi Khusus di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Satuan : x Rp.1.000,-

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah DAK yg diterima	Peruntukan DAK			
			Perik. Tangkap	Perik. Budidaya	P2HP	Pulau2 Kecil
1	Kab. Banjarnegara	1.890.000		1.890.000		
2	Kab. Banyumas					
3	Kab. Batang	2.265.000	1.525.000	740.000		
4	Kab. Blora					
5	Kab. Boyolali	1.932.000		1.932.000		
6	Kab. Brebes					
7	Kab. Cicalap	3.011.000		3.011.000		
8	Kab. Demak	3.316.000	3.316.000			
9	Kab. Grobogan	577.000		577.000		
10	Kab. Jepara	3.215.000	1.240.000	1.000.000	-	975.000
11	Kab. Karanganyar	3.836.570		3.836.570		
12	Kab. Kebumen	2.325.000	2.325.000			
13	Kab. Kendal	2.885.000	1.820.000	1.065.000		
14	Kab. Klaten	2.320.000		1.236.453	1.083.547	
15	Kab. Kudus	2.100.000		2.100.000		
16	Kab. Magelang	2.386.000		2.281.000	105.000	
17	Kab. Pati	3.964.000	2.391.000	1.385.000	188.000	
18	Kab. Pekalongan	2.355.000	2.355.000			
19	Kab. Pemasang	613.000	403.000	210.000		
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Purworejo	2.323.000	900.000	1.228.000	195.000	-
22	Kab. Rembang					

23	Kab. Semarang					
24	Kab. Sragen	2.271.000		2.271.000		
25	Kab. Sukoharjo	2.256.000		2.256.000		
26	Kab. Tegal					
27	Kab. Temanggung	2.797.000		1.504.500	1.292.500	
28	Kab. Wonogiri					
29	Kab. Wonosobo	2.179.000		1.918.136,4	260.863,6	
30	Kota Magelang	1.571.429		1.571.429		
31	Kota Pekalongan	2.110.000	2.110.000			
32	Kota Salatiga					
33	Kota Semarang	553.000		553.000		
34	Kota Surakarta	1.631.000	1.631.000			
35	Kota Tegal	2.019.000	2.019.000			
	Jumlah	58.700.999				

DAK sub bidang perikanan tangkap Tahun 2008 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut :

- (1) Rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana TPI/PPI yang meliputi : fasilitas tambat labuh; fasilitas jalan dan drainase dalam komplek PPI; fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI); fasilitas jaringan air bersih dan listrik; fasilitas perbaikan jaring; fasilitas navigasi pelayaran dan komunikasi; fasilitas sarana transportasi; fasilitas break water/jetty dan Pengerukan alur pelayaran.
- (2) Penyediaan sarana perikanan tangkap yang meliputi : pengadaan sarana penangkapan; pengadaan sarana alat bantu penangkapan; dan pengadaan sarana penanganan ikan diatas kapal.

Sedangkan DAK sub bidang perikanan budidaya Tahun 2008 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kelembagaan perbenihan ikan
- (2) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya

DAK sub bidang P2HP Tahun 2008 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut :

- (1) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan yang meliputi fasilitas pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana cold storage/cool room; fasilitas pengadaan kendaraan dinas/operasional

HASIL PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAWA TENGAH

6.1. BIDANG ADMINISTRASI

6.1.1. Bagian Tata Usaha

1. Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 berjumlah 384 orang, dimana berdasarkan tingkat pendidikannya untuk masing-masing jenjang pendidikan seperti pada tabel 6 berikut :

Tabel 6. Jumlah PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2004 - 2008

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	SD	26	21	29	20	21
2	SMP	17	13	22	16	16
3	SMU	166	163	201	174	181
4	Sarjana Muda	32	33	45	58	40
5	Sarjana/S1	107	86	112	90	89
6	Pasca Sarjana/S2	20	19	36	32	37
7	Doktor/S3	1	1	0	0	0
	Jumlah	369	336	445	390	384

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng

2. Keuangan

a. Anggaran Pembangunan

Anggaran pembangunan Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2008 bersumber dari anggaran rutin dan pembangunan yaitu dari APBD dan APBN dengan total nilai sebesar Rp. 50.913.242.000,- seperti pada tabel 7 berikut :

Tabel 7. Anggaran Pembiayaan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

Satuan: Rp.1.000,00

No	Sumber Dana	2004 (Rp.)	2005 (Rp.)	2006 (Rp.)	2007 (Rp.)	2008 (Rp.)	Rata-rata Peningkatan Tahunan(%)
1	APBD Provinsi	9.462.805,00	11.432.920,00	21.474.966,00	26.454.880,00	28.506.399,00	34,90
2	APBN	83.219.394,00	32.050.000,00	31.678.950,00	34.486.390,01	22.406.843,00	-22,20
3	DAK	18.300.000,00	29.550.000,00	56.160.000,00	70.895.000,00	70.895.000,00	44,44
	Jumlah	110.982.119,00	73.032.920,00	109.313.916,00	131.836.270,01	121.808.242,00	7,12

b. Pendapatan Asli Daerah

Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang OTDA, untuk sektor Kelautan dan Perikanan ditargetkan PAD Tahun 2008 sebesar Rp.16.135.944.000,- dengan realisasi Rp.16.938.108.110,- (104,97%). Secara rinci PAD dari sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2004 - 2008, sebagai berikut :

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

Asal Pendapatan	2004 (Rp. 1.000)	2005 (Rp. 1.000)	2006 (Rp. 1.000)	2007 (Rp. 1.000)	2008 (Rp. 1000)
Jumlah					
Target	17.963.497,0 0	15.090.769,00	12.818.735,00	15.000.000,00	16.135.944,00
Realisasi	13.939.107,2 8	13.286.865,23	12.514.911,18	12.624.554,60	16.938.108,11
Pencapaian (%)	77,60	88,05	97,63	84,16	104,97

3. Bagian Umum

Surat yang masuk maupun surat yang keluar selama 5 (lima) dari Tahun 2004 - 2008 dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Kegiatan Surat Menyurat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

No	Uraian	2004	2005	2006	2007	2008
1	Surat Masuk	9.560	9.875	9.100	9.110	9.224
2	Surat Keluar	8.445	8.550	7.318	6.585	6.945
	Jumlah	18.005	18.425	16.418	15.695	16.169

4. Perlengkapan

Setiap tahun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyediakan perlengkapan mobilitas maupun perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk kelancaran tugas kedinasan. Inventarisasi sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan	
I	Sarana dan Prasarana Mobilitas				
1.	Kendaraan Roda 4	26	Unit		
2.	Kendaraan Roda 2	33	Unit		
II	Perlengkapan Kantor				
1.	Meja Tulis/Meja Subdin/Kasi	315	Buah	Tidak seluruh barang dalam keadaan baik, ± 30% dalam keadaan rusak	
2.	Kursi	177	Buah		
3.	Meja Rapat	34	Buah		
4.	Kursi Rapat	87	Buah		
5.	Mesin Ketik	50	Buah		
6.	Komputer	94	Buah		
7.	Laptop	14	Buah		
8.	OHP	2	Buah		
9.	Filling Cabinet	139	Buah		
10.	Televisi	4	Buah		
11.	Almari Es	7	Buah		
12.	Brankas	4	Buah		
13.	Meja Kursi Tamu/Sice	43	Buah		
14.	Air Conditioner	41	Buah		
15.	Almari Kayu	6	Buah		
16.	Almari Besi	71	Buah		
17.	Kamera	17	Buah		
18.	Handycam	6	Buah		
19.	Rak Besi	10	Buah		
20.	Kursi Putar	68	Buah		
21.	Printer	54	Buah		23 buah rusak
22.	Pesawat Telepon	61	Buah		
23.	Podium	2	Buah		
24.	Aquarium	30	Buah		
25.	Almari Kaca	21	Buah		
26.	Meja Kursi Makan	1	Set		
27.	White Board	14	Buah		
28.	Kursi Lipat	40	Buah		

29.	Meja Ukir	2	Buah	
30.	Kolintang	1	Set	
31.	Almari Buku Kayu Kecil	5	Buah	
32.	Wireless	5	Buah	
33.	Proyektor Film	1	Buah	
34.	Tape Compo	1	Buah	
35.	Horn	2	Buah	
36.	Sound System	1	Buah	
37.	Amplifier	1	Buah	
38.	Meja Telepon	35	Buah	
39.	Papan Datateks	3	Buah	
40.	Faxsimile	7	Buah	
41.	Internet	1	Buah	
42.	Mesin Hitung	5	Buah	
43.	Multi Media Proyektor	1	Buah	
44.	Rak Buku Perpustakaan	8	Buah	
45.	Rak Kayu	2	Buah	
46.	Rak Kartu Katalog	7	Buah	
47.	Meja Baca	2	Buah	
48.	Meja Besi	10	Buah	
49.	Auto Clave	1	Buah	
50.	Analitycal Balance	1	Buah	
51.	Sentrifuse	1	Buah	
52.	Deep freezer	1	Buah	
53.	Micropipet	1	Buah	
54.	Vortex	1	Buah	
55.	PH Meter	1	Buah	
56.	Genset	4	Buah	
57.	Personal Digital Assisten (PDA)	10	Buah	
58.	LCD Proyektor + Screen	1	Buah	
59.	Tabung Pemadam Kebakaran	16	Buah	
60.	Mesin Potong Rumput	8	Buah	
61.	Mesin Penyedot Debu	1	Buah	
62.	Pompa Air	2	Buah	
63.	Beghu	1	Buah	
64.	Scanner	1	Buah	

5. Bagian Hukum, Humas dan Ortala

Salah satu tugas Bagian Hukum, Humas dan Ortala adalah menyediakan pelayanan dibidang perpustakaan untuk mahasiswa, dosen, pelajar, peneliti, dan masyarakat umum termasuk karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun jumlah dan jenis buku perpustakaan yang tersedia seperti pada tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Buku Perpustakaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

No.	Jenis Buku	Sumber Perolehan			
		Pengadaan		Sumber Lain	
		Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1	Perikanan	39	139	13	17
2	Otonomi Daerah	4	13	-	-
3	Hak Ulayat Laut KTI	1	2	-	-
4	Ilmu Gizi	3	6	-	-
5	Kimia Lingkungan	1	2	-	-
6	Ekonomi Sumber Daya Alam	2	4	-	-
7	Pencemaran Lingkungan	6	19	-	-
8	Ekosistem Sumber Daya Alam Pesisir	3	7	-	-
9	Biologi/ Biologi Laut	1	3	-	-
10	Akuntansi/ Keuangan	5	13	-	-
11	Hukum	3	9	-	-
12	Perkapalan	1	4	-	-
13	Ekonomi	2	6	-	-
14	Bisnis	1	2	-	-
15	Statistik	2	6	5	8
16	Managemen	12	35	-	-
17	Perundang-undangan	23	54	2	3
18	Ilmu Pangan	6	21	-	-
19	Pemasaran	1	2	-	-
20	Analisis Anorganikl	1	4	-	-
21	Maritim, Kelautan	8	24	-	-
22	Avertebrata Air	2	6	-	-
23	Teknik Pantai	2	7	-	-
24	Lingkungan/ Ekologi	4	13	-	-

25	Abribisnis	3	8	-	-
26	Perkantoran/ Arsip	1	4	-	-
27	Umum	3	6	1	1
28	Perencanaan Pembangunan	2	5	-	-
29	Kamus	1	3	-	-
30	Metode Penelitian/ Riset	8	21	-	-
31	Komputer	7	21	-	-
32	Pelabuhan	1	4	-	-
33	Pengelolaan Sumber Daya Air	5	21	-	-
34	Ilmu Tanah	1	3	-	-
35	Komunikasi	5	18	-	-
36	Sumberdaya Manusia	1	3	-	-
37	Zoologi	1	1	-	-
38	Air	3	8	-	-
39	Pertanian	-	-	3	3
40	Laporan	-	-	22	23
41	Warta Penelitian	-	-	3	4
42	Klimatologi	-	-	-	-
43	Mangrove	3	8	-	-
44	Buletin	-	-	6	6
45	Jurnal	2	7	26	28
46	Prosiding	-	-	-	-
47	Skripsi	-	-	-	-
48	Majalah	-	-	25	133
	Jumlah	284	932	143	290

Sumber : Perpustakaan Diskanlut Jateng

Adapun jumlah pengunjung atau pemanfaat perpustakaan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 12. Jumlah Pengunjung/ Pemanfaat Perpustakaan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2008

No.	Jenis Pengunjung/ Pemanfaat	2008 (orang)
1.	Karyawan Dislutkan	575
2.	Dosen	16
3.	Peneliti	61
4.	Mahasiswa	2.521
5.	Pelajar	99
6.	Masyarakat Umum	257
	Jumlah	3.529

Sumber : Perpustakaan Dislutkan Jateng

6.2. Perkembangan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

6.2.1. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan

Selama Tahun 2004 - 2008 total volume produksi Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 1,86%, yakni dari 351.531,30 ton (2004) menjadi 320.830,50 ton (2008), tapi tidak diikuti dengan penurunan nilainya karena nilai mengalami peningkatan sebesar 4,99% yaitu dari Rp. 1.926.611.159,00 (2004) menjadi Rp. 2.335.531.301,30 (2008). Perkembangan produksi tersebut diperoleh dari perikanan tangkap dan budidaya seperti pada tabel 13 berikut ini:

Tabel 13. Perkembangan Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

No	Asal Produksi	Tahun					Rata2 Peningk. Perthn (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	Perikanan Tangkap						
	Produksi (ton)	260.832,10	208.763,40	199.115,30	169.690,40	192.124,70	-6,54
	Nilai (Rp.1000)	944.167.329,00	922.177.539,00	866.705.262,00	885.915.493,60	1.009.627.448,30	1,96
2	Perikanan Budidaya						
	Produksi (ton)						
	Nilai (Rp.1.000)	90.699,20	90.457,28	101.080,20	114.007,80	128.705,80	9,29
	Jumlah						
	Produksi (ton)	982.443.830,00	984.405.768,00	1.190.388.735,00	1.305.231.253,00	1.325.903.853,00	8,09
	Nilai (Rp.1.000)	351.531,30	299.220,68	295.782,50	283.698,20	320.830,50	-1,76
		1.926.611.159,00	1.906.583.307,00	2.057.093.997,00	2.191.146.746,60	2.335.531.301,30	4,99

Sumber : Statistik Perikanan Jawa Tengah

Pada kurun waktu tersebut, kontribusi perikanan tangkap (Laut dan Perairan Umum) terhadap total produksi perikanan Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya pendangkalan muara sungai dan panjangnya musim barat (baratan).

Kontribusi perikanan Jawa Tengah tahun 2008 diperoleh dari produksi perikanan tangkap yaitu sebesar 59,58%, sedangkan 40,42% dari perikanan budidaya seperti pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. Perkembangan Kontribusi Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya Terhadap Total Produksi Perikanan Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

No.	Asal Kontribusi	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Perikanan Tangkap	74,19	69,77	65,83	59,81	59,58
2	Perikanan Budidaya	25,80	30,22	34,17	40,19	40,42
	TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Perikanan Jawa Tengah

1. Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap diperoleh dari penangkapan di laut dan dari perairan umum, dimana rata-rata peningkatan pertahun mengalami penurunan sebesar 6,54% (2004-2008), namun tidak diikuti dengan penurunan nilai karena nilainya mengalami peningkatan sebesar 1,96% pertahun.

Produksi perikanan tangkap diperoleh dari penangkapan di Laut dan penangkapan di Perairan Umum, seperti pada tabel 15 berikut :

Tabel 15. Perkembangan Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Jawa Tengah Tahun 2004-2008

No	Asal Produksi	Tahun					Rata-rata Peningkatan Tahunan(%)
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	PERIKANAN LAUT						
	Produksi (ton)	244.389,50	192.586,50	182.394,90	153.698,40	174.587,90	-7,16
	Nilai (Rp. 1000)	836.661.634,00	818.450.925,00	776.600.445,00	764.646.086,00	884.111.955,00	1,70
2	PERAIRAN UMUM						
	Produksi (ton)	16.442,60	16.176,90	16.720,40	15.992,00	17.536,80	1,76
	Nilai (Rp. 1000)	107.505.695,00	103.726.614,40	113.873.371,00	121.269.407,60	125.515.493,30	4,07
	TOTAL						
	Produksi (ton)	260.832,10	208.763,40	199.115,30	169.690,40	192.124,70	-6,54
	Nilai (Rp. 1000)	944.170.329,00	922.177.539,40	866.705.262,00	885.915.493,60	1.009.627.448,30	1,96

Sumber : Statistik Perikanan Jawa Tengah

a. Perikanan Tangkap di Laut

Rata-rata produksi perikanan tangkap di laut pertahun dari Tahun 2004 - 2008 mengalami penurunan sebesar 7,16%/th, dimana ada beberapa penyebab seperti yang tercantum dalam bab VII (permasalahan dan upaya pemecahan masalah).

b. Perikanan Tangkap di Perairan Umum

Penangkapan di Perairan Umum dilakukan di daerah waduk, sungai, telaga dan rawa dengan perkembangan produksi dan nilai produksi seperti pada tabel 16 berikut :

Tabel 16. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Tangkap Di Perairan Umum Tahun 2004-2008

No	Asal Produksi	Tahun					Rata-rata Peningkatan Tahunan(%)
		2004	2005	2006	2007	2008	

1	WADUK						
	Produksi (ton)	5.206,7	4.716,0	5.846,9	4.863,6	4.773,1	-1,03
	Nilai (Rp. 1000)	32.686.003,00	29.411.661,00	40.505.681,00	43.760.098,00	48.861.153,70	11,85
2	SUNGAI						
	Produksi (ton)	9.500,0	9.470,7	8.562,9	8.427,0	10.514,4	3,32
	Nilai (Rp. 1000)	64.675.398,00	62.726.018,00	58.867.830,00	59.618.687,00	67.634.161,60	1,39
3	DANAU						
	Produksi (ton)	394,8	6,5	4,7	10,3	8,3	-6,58
	Nilai (Rp. 1000)	2.574.130,00	127.250,00	48.800,00	102.931,00	51.867,00	-23,85
4	RAWA						
	Produksi (ton)	1.341,1	1.983,7	2.305,9	2.691,1	2.241,0	16,03
	Nilai (Rp. 1000)	7.570.164,00	11.461.685,00	14.451.060,00	17.787.692,00	8.968.311,00	12,77
	TOTAL						
	Produksi (ton)	16.442,6	16.176,9	16.720,4	15.992,0	17.536,8	1,76
	Nilai (Rp. 1000)	107.505.695,00	103.726.614,00	113.873.371,00	121.269.408,00	125.515.493,30	4,07

Sumber : Statistik Perikanan Jawa Tengah

b.1. Waduk

Rata-rata produksi perikanan waduk (Tahun 2004 - 2008) mengalami penurunan sebesar 1,03%/tahun. Sedangkan volume produksi perikanan waduk Tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 1,86% dari 4.863,60 ton (2007) menjadi 4.773,10 ton (2008), tapi tidak diikuti dengan penurunan nilainya karena nilai mengalami peningkatan sebesar 11,66% yakni dari Rp.43.760.098.000,- (2007) naik menjadi Rp. 48.861.153.700,- (2008).

b.2. Sungai

Dari rata-rata pertahun telah terjadi kenaikan produksi di sungai sebesar 3,32% (Tahun 2004-2008), diikuti dengan kenaikan nilainya sebesar 1,39%.

b.3. Danau

Dari rata-rata produksi di danau Tahun 2004 - 2008 telah terjadi penurunan sebesar 6,58%/thn yang diikuti rata-rata penurunan nilainya sebesar 23,85%/thn.

b.4. Rawa

Produksi rawa rata-rata pertahun mengalami peningkatan sebesar 16,03%/thn (2004-2008), diikuti dengan kenaikan rata-rata nilainya sebesar 12,77%/thn.

2. Perikanan Budidaya

Kegiatan budidaya ikan air tawar dilaksanakan di kolam, karamba, waduk, serta tambak, dimana perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan budidaya air tawar dari Tahun 2004 - 2008 seperti tertera pada tabel 17 berikut :

Tabel 17. Perkembangan Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

No	Asal Produksi	Tahun					Rata-rata Peningkatan Pertahun(%)
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	Marine Culture Produksi (ton)	0	3.248,28	2.531,80	1.854,00	2.249,00	18.11
		0	1.624.140,00	1.265.875,00	1.234.560,00	1.271.525,00	19.62
	Nilai (Rp. 1000)						
2	Tambak Produksi (ton)	57.293,80	52.381,30	58.935,40	67.819,20	68.395,80	4.97
		694.097.429,00	671.977.425,00	836.362.435,00	884.643.608,00	718.417.681,60	2.06
	Nilai (Rp. 1000)						
3	Kolam Produksi (ton)	23.424,00	25.359,70	28.236,00	34.619,80	45.301,30	18.27
		189.905.030,00	228.832.957,00	260.627.296,00	330.042.674,00	471.069.709,40	25.94
	Nilai (Rp. 1000)						
4	Karamba Produksi (ton)	6.637,70	374,90	481,30	494,90	617,60	-9.59
		68.566.902,00	5.603.569,00	3.763.000,00	4.965.470,00	13.504.482,00	19.81
	Nilai (Rp. 1000)						
5	Karamba Jaring Apung Produksi (ton)	0	6.737,30	6.965,50	7.168,90	9.862,40	35.97
		0	53.262.046,00	62.226.648,00	64.786.964,00	100.692.462,00	44.09
	Nilai (Rp.						

	1000)						
6	Sawah						
	Produksi (ton)	3.343,70	2.339,90	3.930,90	2.051,00	2.279,60	0.32
	Nilai (Rp. 1000)	29.874.469,00	22.969.780,00	26.143.482,00	19.557.977,00	20.947.992,80	-6.84
	Total						
	Produksi (ton)	90.699,20	90.457,28	101.080,20	114.007,80	128.705,80	9.29
	Nilai (Rp. 1000)	982.443.830,00	984.405.768,00	1.190.388.735,00	1.305.231.253,00	1.325.903.853,00	8.09

Sumber : Statistik Perikanan Budidaya Jawa Tengah

Dari rata-rata diatas terlihat adanya peningkatan produksi rata-rata pertahun (2004-2008) sebesar 9,29%.

a. Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak)

Perikanan budidaya air payau selama 5 (lima) tahun yakni dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,97%/thn.

Pada Tahun 2008 produksi tambak mengalami peningkatan sebesar 0,85% dari 67.819.200 kg pada Tahun 2007 menjadi 68.395.800 kg pada Tahun 2008. Namun untuk nilai produksi mengalami penurunan 18,79% dari Rp. 884.643.608.000,- (2007) menjadi Rp. 718.417.681.600,- (2008).

b. Perikanan Budidaya Air Tawar

b.1. Perikanan Kolam

Produksi perikanan kolam menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pertahun (2004-2008) sebesar 18,27%, diikuti dengan peningkatan nilainya sebesar 25,94%. Pada Tahun 2008 ini terlihat adanya peningkatan produksi sebesar 30,85% dari 34.619.800 kg (2007) menjadi 45.301.300 kg (2008), dengan diikuti meningkatnya nilai produksi sebesar 42,73% yaitu dari Rp. 330.042.674.000,- (2007) menjadi Rp. 471.069.709.400,- (2008).

b.2. Perikanan Mina Padi (Sawah)

Produksi perikanan mina padi mengalami peningkatan rata-rata pertahunnya 0,32% (2004 - 2008), namun tidak diikuti dengan kenaikan nilai produksi karena nilai produksi mengalami penurunan sebesar 6,84% per-tahun. Pada Tahun 2008, produksi perikanan mina padi ini mengalami peningkatan sebesar 11,15% dari 2.051,00 ton (2007) menjadi 2.279,60 ton (2008), sedangkan nilai produksinya mengalami peningkatan sebesar 7,11% dari Rp. 19.557.977.000,- (2007) menjadi Rp. 20.947.992.800,- (2008).

3. Komoditas Andalan Perikanan Jawa Tengah

a. Perikanan Laut

Komoditas andalan perikanan hasil penangkapan ikan di laut antara lain : Kakap Merah, Kerapu, Bawal, Layang, Kecubung, Tenggiri, Tongkol, Udang Barong, Udang Windu, Udang Putih, Cakalang, Cumi - Cumi, Rajungan, Tuna dan Ubur - Ubur.

Perkembangan produksi komoditas andalan Jawa Tengah dari penangkapan ikan di laut, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 18. Perkembangan Komoditas Andalan Perikanan Penangkapan Ikan Di Laut Tahun 2004 - 2008

No	Komoditas	Produksi (ton)					Rata-rata Peningkatan Tahunan(%)
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	Kakap	1.032,4	538,8	505,8	733,2	642,1	-5,4
2	Kerapu	47,5	516,7	231,0	222,2	171,1	226,4
3	Bawal	1.545,3	2.285,0	2.903,0	2.681,5	2.903,7	18,9
4	Layang	71.330,9	37.420,5	35.498,3	31.811,7	37.315,4	-11,4
5	Kembung	12.189,4	10.866,7	11.603,9	10.212,9	10.268	3,9
6	Ubur-ubur	574,2	8,9	29,1	398,6	70,7	329
7	Tenggiri	2.845,4	2.813,7	3.072,9	3.184,1	3.120,6	2,43
8	Tongkol	11.763,3	10.899,7	11.075,2	8.986,0	10.218,3	-2,72
9	Udang Barong	12,8	129,7	22,1	39,5	28,6	220,36
10	Udang Putih	477,3	349,7	603,5	272,5	454,4	14,44
11	Udang windu	93,9	3,6	1,4	0	0	0
12	Cumi-cumi	2.446,9	2.023,9	2.012,7	2.005,3	2.065,9	-3,8
13	Rajungan	31,1	38,6	22,8	90,2	145,1	84,92
14	Cakalang	2.068,8	985,2	4.539,5	2.758,2	2.283,5	62,99
15	Tuna	791,6	2.482,1	4.657,7	5.690,3	1.381,3	61,91
	Total	107.250,8	71.326,8	76.778,9	69.086,2	71.068,7	-8,25

Sumber : Statistik Perikanan Jawa Tengah

b. Perikanan Budidaya

Komoditas andalan perikanan budidaya terdiri dari budidaya air payau (tambak) dan budidaya air tawar, dengan jenis komoditas andalan yaitu Udang Windu, Udang Putih, Gurame, Nila Merah dan Lele.

Perkembangan produksi komoditas andalan perikanan budidaya Tahun 2004 - 2008 seperti pada tabel berikut :

Tabel 19. Perkembangan Produksi Andalan Perikanan Budidaya Tahun 2004 - 2008

No	Komoditas	Produksi (ton)					Rata-rata Peningkatan Tahunan(%)
		2004	2005	2006	2007	2008	

1	Udang Windu	4.601,2	5.387,1	5.817,60	6.324,7	3.336,6	-3.36
2	Udang Putih	5.972,4	4.308,3	5.678,80	5.582,5	1.656,0	-17.02
3	Nila Merah	8.930,9	9.859,20	12.339,50	12.361,9	15.255,4	14.78
4	Bandeng	35.777,80	33.649,00	36.385,50	39.428,4	45.364,7	6.40
5	Kakap	622,10	426,70	410,70	517,4	30,8	-25.81
6	Kepiting/Rajungan	798,60	788,30	635,40	851,2	872,4	3.94
7	Mas	5.352,80	3.830,80	4.673,81	4.563,7	5.512,9	3.00
8	Lele	10.229,90	11.528,80	12.652,10	14.961,0	23.072,1	23.73
9	Gurame	3.356,40	3.596,90	3.138,8	4.221,7	5.410,1	14.27
	TOTAL	75.642,10	73.375,10	81.732,26	88.812,5	100.511,0	7.56

Sumber : Statistik Perikanan Jawa Tengah

4. Areal dan Populasi

a. Perikanan Laut

Panjang pantai di Jawa Tengah sebanyak 828,82 km, dengan luas penangkapan ikan Pelagis 10.087,47 km² dan penangkapan demersal 10.087,47 km². Sedangkan potensi lestari, tingkat pemanfaatan dan peluang pengembangan kelompok sumberdaya ikan laut di wilayah perairan Laut Jawa Tengah dan Samudra Hindia, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Potensi Lestari Tingkat Pemanfaatan Dan Peluang Pengembangan Sumberdaya Ikan Laut Pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Tahun 1997

No	Perairan	Jenis Ikan	Potensi Lestari (ribu/ton/thn)	Tingkat Pemanfaatan (%)	Peluang Pengembangan (%)
1	Laut Jawa	Pelagis Besar	55,0	82,47	7,53
		Pelagis Kecil	340,0	130,26	-
		Demersal	431,2	56,12	33,88
		Ikan Karang	9,5	121,68	-
		Udang Penaeid	10,8	102,78	-
		Lobster	0,5	26,00	64,0
		Cumi-cumi	5,04	101,19	-

2	Samudra Hindia	Pelagis Besar	323,18	53,53	36,47
		Pelagis Kecil	429,03	41,72	48,28
		Demersal	135,13	83,62	6,38
		Ikan Karang	13,18	113,81	-
		Udang Penaeid	10,70	60,75	29,25
		Lobster	1,60	44,38	45,62
		Cumi-cumi	3,75	64,53	25,47

Dari luas daerah penangkapan untuk perairan Laut Jawa, peluang pengembangan adalah untuk jenis Ikan Pelagis besar 7,53 %, Ikan Demersal 33,88 % dan jenis Lobster 64,0 %. Sedangkan untuk perairan Samudra Hindia, jenis Ikan Pelagis Besar 36,47 %, Ikan Demersal 6,38 %, Udang Penaeid 29,25 %, Lobster 45,62 %, dan Cumi-cumi 25,47 %

b. Perikanan Perairan Umum

Luas areal perairan umum (Waduk, Sungai, Telaga, dan Rawa) Tahun 2008 tidak mengalami perubahan yakni seluas 43.791 Ha.

Secara rinci perkembangan luas areal perairan umum dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 21. Perkembangan Luas Lahan Perairan Umum Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

No.	Jenis Lahan	Luas Areal (Ha)				
		2004	2005	2006	2007	2008*
1	Waduk	16.459	16.459	23.195	23.195	26.079
2	Sungai	9.630	9.630	15.014	13.714	14.084
3	Telaga	1.323	1.323	75	75	75
4	Rawa	1.018	1.018	3.573	3.573	3.553
	Total	28.430	28.430	41.857	40.557	43.791

Sumber : Statistik Perikanan Jawa Tengah, *) Data Sementara

c. Perikanan Budidaya

c.1. Perikanan Air Payau (Tambak)

Total luas tambak di Jawa Tengah pada Tahun 2008 meningkat dari 37.873,90 Ha pada tahun 2007 menjadi 38.535,40 Ha pada tahun 2008.

c.2. Perikanan Kolam

Total luas perikanan di kolam Tahun 2008 mengalami penurunan dari 3.261,90 Ha pada tahun 2007 menjadi 2.940,70 Ha pada tahun 2008.

c.3. Perikanan Mina Padi

Total luas perikanan Mina Padi Tahun 2008 mengalami penurunan dari 5.861,20 Ha pada tahun 2007 menjadi 5.640,40 Ha pada tahun 2008.

c.4. Perikanan Karamba

Total luas perikanan Karamba Tahun 2008 meningkat dari 86,20 Ha pada tahun 2007 menjadi 87,89 Ha pada tahun 2008.

Secara rinci perkembangan luas lahan perikanan budidaya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 22. Perkembangan Luas Lahan Perikanan Budidaya Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

No.	Jenis Lahan	Luas Areal (Ha)				
		2004	2005	2006	2007	2008

1	Tambak	37.600,30	38.910,70	42.119,70	37.873,90	38.535,40
2	Kolam	3.286,60	3.332,00	3.261,80	3.261,90	2.940,70
3	Mina Padi	4.654,70	4.166,00	5.628,60	5.861,20	5.640,40
4	Karamba	66,20	68,27	8,10	86,20	87,89
5	K. Jaring Apung	0,00	0,00	60,00	4,00	104,20
6	Laut	0,00	275,00	275	270,00	275
	Total	45.607,80	46.476,97	51.018,20	47.357,20	47.583,59

Sumber : Statistik Perikanan Jawa Tengah

5. Sarana dan Prasarana

a. Prasarana Penangkapan Ikan

Dalam pemasaran produksi hasil penangkapan ikan laut disediakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dimana dalam pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Penggunaan hasil pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan tersebut diatur seperti dalam lampiran.

Kegiatan usaha nelayan tidak dapat dipisahkan dari peran KUD Mina sebagai lembaga ekonomi nelayan. Dari 22 KUD Mina yang berada di Jawa Tengah, seluruhnya sudah mencapai predikat KUD Mandiri, bahkan KUD Makaryo Mino Pekalongan telah mencapai Predikat KUD Mandiri Inti.

Jumlah TPI di Jawa Tengah sebanyak 77 TPI dimana 67 TPI berada di Pantai Utara dan 10 TPI sisanya berada di Pantai Selatan. Dari 77 TPI tersebut, 3 TPI termasuk dalam Unit Pelaksanaan Teknis Pusat yaitu PPNP (Pekalongan), PPNC (Cilacap) dan Pelabuhan Basis Perikanan Karimunjawa. Ada 2 TPI yang menjadi penghasil utama produksi perikanan laut di Jawa Tengah yaitu PPNP (Pekalongan) dan PPI Bajo Mulyo Kabupaten Pati.

Guna mengetahui penyebaran TPI di Jawa Tengah Tahun 2005 dengan produksi dan nilai produksinya dapat dilihat pada lampiran 5, dan Kelas TPI/PPI pada lampiran 6.

b. Prasarana Budidaya Ikan

b.1. Prasarana Budidaya Air Tawar

Salah satu prasarana untuk meningkatkan usaha budidaya air tawar adalah Balai Benih Ikan/ Udang sebagai penghasil benih ikan/ udang, sehingga berperan sangat penting dalam keberhasilan pengembangan usaha budidaya ikan air tawar, dimana di Jawa Tengah ada 61 BBI/ BBU yang tersebar dan dikelola oleh daerah Tingkat II seperti terlihat pada lampiran.

Sedangkan untuk prasarana budidaya air tawar yang dikelola oleh tingkat provinsi ada 3 (tiga) Satuan Kerja (Satker) yakni Satker Perbenihan Budidaya Ikan Air Tawar yang terletak di Ngrajeg - Magelang, Ambarawa - Semarang, dan Janti - Klaten, dimana ketiga Satker tersebut dibawah koordinasi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan di Muntilan - Magelang.

b.2. Prasarana Budidaya Air Payau

Prasarana untuk meningkatkan usaha budidaya air payau terdapat 3 (tiga) Satuan Kerja (Satker) yakni Satker Perbenihan Budidaya Air Payau yang terletak di Karanganyar Tugu - Semarang, Sluke - Rembang, dan Maribaya - Tegal. Seperti halnya Satker Budidaya Air Tawar, Satker Perbenihan Budidaya Air Payau ini dibawah koordinasi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan di Muntilan - Magelang.

c. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Sesuai fungsinya sebagai pelaksana pembinaan teknis lintas Kabupaten/ Kota, pemberian bimbingan, standarisasi, pengawasan dibidang produksi benih, mutu, penangkapan ikan dan penyelenggaraan pelelangan ikan, maka ada 5 UPT di Jawa Tengah yaitu :

1. Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Pekalongan
2. Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Cilacap
3. Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Pati
4. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan
5. Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

Tugas pokok Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan adalah :

1. Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Melaksanakan kebijakan teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan

Tugas Pokok Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan:

1. Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Melaksanakan kebijakan teknis operasional pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan

d. Armada Penangkapan Ikan

Penggunaan armada penangkapan ikan sebagai pendukung utama dalam operasi penangkapan ikan merupakan dasar keberhasilan penangkapan ikan, disamping jalur penangkapan diluar 12 mil.

Banyaknya jumlah armada penangkapan ikan berkaitan dengan jumlah hasil ikan yang tertangkap, sehingga usaha penangkapan ikan memiliki produktivitas seperti tabel berikut :

Tabel 23. Jumlah Armada Penangkapan Ikan Dan Produktivitas Armada Penangkapan Ikan Tahun 2004 - 2008

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Peningkatan Pertahun(%)
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	Jumlah Armada	27.393	26.597	19.217	18.498	18.184	-9,02
2	Jumlah Produksi	244.389.500	192.586.500	177.981.900	153.698.400	174.587.900	-7,21
3	Produktivitas/kg/ Armada/tahun	892.160,40	724.091,06	926.169,02	830.891,99	960.118,24	3,58

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah

e. Alat Tangkap

Penggunaan alat tangkap diarahkan pada usaha diversifikasi sehingga dengan memiliki lebih dari 1 (satu) alat tangkap, dapat menangkap ikan pada seluruh musim penangkapan ikan.

Jenis alat tangkap di Jawa Tengah seperti pukot pantai, payang, pukot cincin, dogol, *trammel net*, jaring insang, jaring angkat, dengan jenis ikan ekonomis yang tertangkap antara lain udang, tongkol, tuna, cakalang, kakap, tengiri, bawal, layur, teri, manyung, cucut, pari, dan rajungan.

Perkembangan jenis alat tangkap di Jawa Tengah dari tahun ke tahun seperti tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 24. Perkembangan Jenis Alat Tangkap Ikan Di Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

NO	URAIAN	JUMLAH					Rata-rata Peningkatan Pertahun(%)
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	PUKAT KANTONG - Payang	8.098	11.029	10.324	10.249	9.946	6,53

	- Dogol	2.241	3.967	2.856	3.038	2.804	11,92
	- Pukat Pantai	3.279	4.654	5.420	5.100	5.028	12,77
		2.578	2.408	2.048	2.111	2.114	-4,58
	PUKAT CINCIN						
2		1.388	666	1.340	1.321	1.327	12,06
	JARING						
3	a. Jaring Insang	25.035	22.455	11.485	8.224	7.740	-23,36
	- Jaring Insang Hanyut	22.539	20.247	10.676	7.502	7.586	-21,51
	- Jaring Lingkar	3.832	3.023	3.223	2.937	2.810	-6,92
	- Jaring Klitik						
	- Trammel Net						
	- Jaring Insang Tetap	0	0	0	120	120	25,00
	b. Jaring Angkat						
	- Bagan	1.845	1.026	91	226	226	3,21
	- Bagan tancap	7.447	7.815	2.832	1.214	1.237	-28,51
	- Serok	9.415	8.383	4.530	3.005	3.193	116,01
	- Lain-lain						
		2.496	2.208	809	722	154	-41,08
	PANCING	1.668	648	256	315	0	-49,65
	- Rawai Tuna	519	1.251	508	85	0	-25,40
	- Rawai Hanyut Lain selain Tuna	309	309	45	322	154	119,49
		0	0	0	0	0	0
	- Rawai Tetap						
4	- Rawai Tetap Dasar	2.814	2.418	2.232	2.025	1.843	-10,01
	- Pancing	245	245	93	93	133	-4,76
	- Pancing Tonda	9	9	14	62	255	177,43
	- Pancing Tegak						
		0	587	607	320	173	2,55
	PERANGKAP	0	116	109	195	109	32,19
	- Sero	1.762	1.294	962	780	726	-19,51
	- Bubu	646	0	447	447	447	0
	- Lain-lain	152	167	0	128	0	-22,53
	- Jermal						

5		2.273	2.683	2.849	728	1.258	5,64
	ALAT PENGUMPUL KERANG	0	0	0	0	0	0
		2.045	2.246	2.304	582	682	-11,29
	LAIN - LAIN	228	389	497	146	576	80,57
		0	48	48	0	0	0
6		25	25	25	0	0	0
7		1.253	1.151	365	402	90	-35,98
	TOTAL	40.886	40.427	28.620	22.949	22.204	-13,35

Sumber : Statistik Perikanan Jawa Tengah

f. Nelayan dan Petani Ikan

f.1. Nelayan

Produksi perikanan Tahun 2008 dari TPI se Jawa Tengah sebesar 190.940.100 kg merupakan hasil tangkapan para nelayan yang tersebar di 17 Kabupaten/ Kota, dimana untuk pantai utara sebanyak 13 Kabupaten/ Kota dan pantai selatan 4 Kabupaten dengan jumlah nelayan Tahun 2008 sebanyak 146.422 orang.

Dari jumlah nelayan dan jumlah produksi yang dihasilkan akan diperoleh data produktivitas nelayan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 25. Produktivitas Nelayan Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-rata Peningkatan Tahunan(%)
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	Produksi	244.389.500	192.586.500	182.394.900	153.698.400	174.587.900	-7,16
2	Jumlah Nelayan	172.418	191.968	144.858	168.115	146.422	-2,51
3	Produktivitas/Kg/nelayan/tahun	141.742,45	100.322,19	125.912,89	91.424,56	119.236,11	-0,17

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah

f.2. Pembudidaya dan Nelayan Perairan Umum

Pada Tahun 2008 jumlah pembudidaya dan nelayan perairan umum sebanyak 219.593 RTP, yang terdiri dari 189.046 RTP Pembudidaya dan 30.547 RTP Nelayan Perairan Umum.

Tabel 26. Perkembangan Jumlah Petani Ikan Dan Nelayan Perairan Umum Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

Satuan : RTP

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-rata Peningkatan Tahunan(%)
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	Pembudidaya	211.829	207.408	152.669	181.145	189.046	-1,37
2	Nelayan Perairan Umum	37.914	30.124	22.149	24.500	30.547	3.055,56
	TOTAL	249.743	237.532	174.818	205.645	219.593	-1,72

Sumber : Statistik Perikanan Jawa Tengah

6. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Jawa Tengah

Perbaikan pendapatan petani nelayan Jawa Tengah terus diupayakan melalui usaha perbaikan dan penyempurnaan sarana/prasarana, maupun pembinaan dan penyuluhan yang berkelanjutan melalui memperkenalkan serta menerapkan teknologi yang dianjurkan, maupun memperbaiki mata rantai pemasaran ikan melalui informasi harga pasar ikan.

a. Nelayan Laut

Pendapatan nelayan laut perkapita pertahun (2004-2008) mengalami penurunan, rata-rata pertahun ada penurunan sebesar 3,27%.

b. Nelayan Perairan Umum

Pendapatan nelayan perairan umum perkapita pertahun (2004-2008) mengalami peningkatan sebesar 10,30%.

c. Pembudidaya Tambak (Air Payau)

Pendapatan petambak perkapita pertahun (2004-2008) mengalami peningkatan sebesar 8,43%.

d. Pembudidaya Kolam

Pendapatan pembudidaya ikan (kolam) perkapita pertahun (2004-2008) mengalami peningkatan sebesar 16,09%.

e. Pembudidaya Mina Padi

Pendapatan petani mina padi perkapita pertahun (2004-2008) mengalami penurunan rata-rata pertahun sebe

d. Pembudidaya Karamba

Perkembangan pendapatan petani Karamba perkapita pertahun mengalami peningkatan sebesar 9,01% dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008.

Secara terperinci perkembangan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan dari Tahun 2004 sampai 2008, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 27. Perkembangan Pendapatan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Peningkatan Pertahun(%)
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	LAUT						
a	Nilai (Rp. 1000)	836.664.634	818.450.925	776.600.445	764.646.086	712.845.438	-3,90
b	Jumlah Nelayan	172.418	191.968	168.114	168.115	168.115	-0,62
c	Pendapatan (Rp/Kap/Tahun)	4.852.519,08	4.263.475,81	4.619.487,04	4.548.351,34	4.240.225,07	-3,27
2	PERAIRAN UMUM						
a	Nilai (Rp. 1000)	107.505.695	103.726.614	113.873.371	121.269.407,60	153.672.675,70	9,87
b	Jumlah Nelayan	31.266	30.720	30.721	30.722	30.722	-0,43
c	Pendapatan (Rp/Kap/Tahun)	3.438.421,77	3.376.517,38	3.706.694,80	3.947.314,88	5.002.040,09	10,30
3	TAMBAK						
a	Nilai (Rp. 1000)	694.097.429	671.977.425	836.362.435	884.643.608	902.336.480,16	7,26
b	JumlahPembudidaya	121.795	116.195	116.196	116.197	116.197	-1,15
c	Pendapatan (Rp/Kap/Tahun)	5.698.899,21	5.783.187	7.197.859,09	7.613.308,50	7.765.574,67	8,43
4	KOLAM						
a	Nilai (Rp. 1000)	189.905.030	228.832.957	260.627.296	330.042.674	336.643.527,48	15,76
b	JumlahPembudidaya	481.089	475.875	475.876	475.877	475.877	-0,27
c	Pendapatan	394.739,91	480.867,78	547.679,01	693.546,18	707.417,10	16,09

	(Rp/Kap/Tahun)						
5	MINA PADI						
a	Nilai (Rp. 1000)	29.874.469	22.969.780	26.143.482	19.557.977	19.949.136,54	-8,12
b	JumlahPembudidaya	47.268	46.514	46.515	46.516	46.516	-0,40
c	Pendapatan (Rp/Kap/Tahun)	632.023,12	493.825,08	562.044,11	420.456,98	428.866,12	-7,81
6	KARAMBA						
a	Nilai (Rp. 1000)	68.566.902	58.865.615	65.989.648	69.752.434	71.147.482,68	1,41
b	JumlahPembudidaya	5.894	4.352	4.353	4.354	4.354	-6,53
c	Pendapatan (Rp/Kap/Tahun)	11.633.339,33	13.526.106,39	15.159.579,14	16.020.310,98	16.340.717,20	9,01

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah

7. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

Upaya yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam pembinaan pasca panen dan pemasaran meliputi 9 kegiatan yaitu :

1. Pembinaan/ pengelolaan pasca panen dan pemasaran
2. Pengembangan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)
3. Pada saat pasca panen
4. Para pengolah hasil perikanan tradisional
5. Bimbingan/ pelatihan penerapan konsepsi HACCP kepada unit-unit pengolah hasil perikanan
6. Meningkatkan efisiensi pemasaran
7. Menyiapkan laporan dan evaluasi terhadap pengembangan sarana informasi pasar serta menganalisa dan mempromosikannya
8. Meningkatkan pelayanan terhadap informasi pasar
9. Menyiapkan produk hukum untuk penerapan PMMT

1.1. Pembinaan/ Pengelolaan Pasca Panen dan Pemasaran

- a. Diarahkan lebih meningkatkan mutu dan nilai tambah melalui usaha pengolahan baik secara tradisional maupun modern
- b. Meningkatkan ekspor komoditas unggulan perikanan
- c. Meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat

1.2. Pengembangan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)

- a. Perluasan kegiatan pembinaan sejak pra-panen hingga pasca panen
- b. Menerapkan konsep HACCP pada unit pengolahan secara bertahap, melalui :
 - Pembinaan mutu dan peninjauan secara berkala pada unit pengolahan khususnya udang beku, kodok/ikan beku, pengalengan dalam rangka mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Sertifikat Mutu Ekspor, serta memiliki minimal seorang karyawan yang ber-Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) dalam bidang *hygiene*.
 - Melengkapi dan menyempurnakan LPPMHP yang ada di Semarang, Pekalongan dan Cilacap dalam pembinaan dan pengawasan PMMT, serta mengadakan pengujian mutu produk yang akan diekspor secara laboratoris yang meliputi pengujian *organoleptic*, *microbiologi*, *chemis* dan *phisis*.

1.3. Pasca Panen

- a. Penanganan di kapal-kapal dan sentra-sentra pendaratan ikan melalui
 - Pembinaan tentang persyaratan sanitasi dan hygiene dalam penggunaan es, mutu air dari es yang memenuhi persyaratan air minum.
 - Adanya fasilitas air bersih di PPI/TPI/KPPD yang memenuhi syarat teknis
- b. Pada saat pengangkutan dan distribusi
Meliputi teknik penanganan dan penyediaan wadah yang terisolasi (Box dan Truk Retrigerasi)
- c. Pada saat penumpukan/ pengumpulan
Ditujukan kepada para pengumpul tentang teknis sanitasi, hygiene dan teknik penanganan.

1.4. Pengolah Hasil Perikanan Tradisional

Diarahkan untuk memenuhi Surat Keterangan Mutu (SKM) sebelum dipasarkan ke luar negeri, serta membangun bangsal-bangsal percontohan di Kabupaten/ Kota secara berkala.

1.5. *Bimbingan/ Pelatihan Penerapan Konsepsi HACCP Kepada Unit-Unit Pengolah Hasil Perikanan*

- a. Bidang Teknologi
 - Pengembangan metode pengujian kaleng
 - Pengembangan metode pengujian kimia
 - Pengembangan metode pengujian mikrobiologi
- b. Bidang Perekayasaan Teknologi Pengolah Hasil
 - Teknologi bahan pengawet
 - Teknologi *Fish Jelly Product*
 - Teknologi Perbaikan pemasaran

1.6. *Meningkatkan Efisiensi Pemasaran*

- a. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama ataupun Koperasi
- b. Pelaksanaan Kemitraan Usaha
- c. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis dan manajemen usaha

1.7. *Pelaporan dan Evaluasi*

Dalam membuat laporan dan evaluasi, masih menghadapi kendala antara lain :

- a. Keterbatasan dana untuk pengumpulan data
- b. Beberapa produk ekspor belum memiliki SNI, dan SNI yang kadaluwarsa belum direvisi
- c. Laboratorium terakreditasi kesulitan memperoleh dana untuk surveylensi yang seharusnya minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

1.8. *Meningkatkan Pelayanan Terhadap Informasi Pasar*

Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan informasi pasar antara lain :

- a. Umumnya bahan baku diolah dalam produk primer
- b. Sebagian daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki sarana dan prasarana pengolahan produk bernilai tambah.

1.9. Menyiapkan Produk Hukum Untuk Penerapan PMMT

Mengingat beberapa produk ekspor belum memiliki SNI dan persyaratan penggunaan bahan pengawet/ kimia atas produk ekspor, maka penegakan hukum dalam penerapan SNI masih lemah.

8. Pengolahan Hasil Perikanan

Industri pengolahan perikanan meliputi industri tradisional dan modern, dimana pengolah tradisional merupakan pengolah kecil hingga menengah dengan orientasi pasar lokal, sedangkan industri modern mempunyai skala produksi yang lebih besar dengan tujuan ekspor.

Industri modern meliputi pembekuan dan pengalengan sedangkan olahan tradisional meliputi penggaraman/pengeringan, pemindangan, pengasapan, fermentasi dan terasi. Perlakuan/ pemanfaatannya antara lain dikonsumsi segar, pengeringan/ penggaraman, pindang, pengasapan, pengalengan, tepung ikan seperti tersaji pada lampiran. Dari total produksi perikanan Jawa Tengah Tahun 2008 sebesar 192.124,70 ton dikonsumsi segar/peng-esan sebanyak 40,89% (78.766ton), penggaraman 30,77% (59.261,50ton), pemindangan 15,06% (29.022,60ton), pengasapan 9,69% (18.668ton), peragian 0,46% (901,6ton), pembekuan 1,90% (3.665,20ton), pengalengan 0,67% (1.297,70ton), tepung ikan 0,17% (339,9ton), dan lain-lain 0,34% (664ton).

9. Pemasaran/ Ekspor

Dari total ekspor Tahun 2008 sebesar 17.794.068,77 kg yang terdiri dari 32 jenis komoditas pemasarannya ke 28 negara tujuan oleh 24 buah perusahaan eksportir dalam bentuk produk beku, kaleng, kering dan segar.

Volume ekspor Tahun 2008 dibandingkan Tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 10,75% diikuti dengan penurunan nilainya sebesar 3,86%, sebagaimana terlampir.

Perkembangan ekspor komoditas perikanan Jawa Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fase naik turun dan apabila dilihat rata-rata volume ekspor per tahun mengalami penurunan sebesar 2,68% yang diikuti penurunan rata-rata nilai ekspor sebesar 4,82%, dimana secara rinci perkembangan ekspor hasil perikanan Jawa Tengah dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 28. Perkembangan Volume Dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

Uraian	Tahun					%
	2004	2005	2006	2007	2008	
Volume (Kg)	20.603.545,02	16.743.424,72	17.064.736,82	19.938.399,15	17.794.068,77	-2,68
Nilai (US \$)	89.659.296,20	70.179.307,99	70.614.933,33	74.643.244,22	71.762.355,41	-4,82

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah

10. Konsumsi Ikan

Salah satu faktor dalam meningkatkan status gizi bagi masyarakat adalah masalah konsumsi pangan, dimana konsumsi pangan dipengaruhi oleh penyediaan pangan dan permintaan pangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan pangan adalah produk dalam negeri, ekspor/ impor dan distribusi pemasaran, sedangkan permintaan pangan dipengaruhi oleh kependudukan, sosial budaya dan faktor ekonomi.

Dasar untuk menentukan tingkat konsumsi ikan adalah produksi, ekspor dan jumlah penduduk, dimana produksi perikanan Tahun 2008 sebanyak 320.830.500 kg dan ekspor sebesar 17.794.068,77 kg serta jumlah penduduk sebanyak 32.626.390 orang, maka konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah Tahun 2008 tercapai sebesar 15,83 kg/kap/tahun.

Perkembangan konsumsi ikan perorang pertahun dari Tahun 2004 - 2008 seperti tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 29. Perkembangan Produksi Perikanan, Ekspor Dan Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

No	Uraian	Tahun					Peningkatan (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	Produksi (kg)	366.104.600,00	334.999.680,00	295.782.500	283.698.200	320.830.500	-1,76
2	Ekspor (kg)	20.603.545,02	16.743.424,72	17.064.736,82	19.938.399,15	17.794.068,77	-2,68
3	Penduduk (org)	32.397.431,00	34.363.473,00	32.177.730	32.380.279	32.626.390	0,27
	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	9,99	9,47	13,76	13,32	15,83	13,94

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah

Perkembangan rata-rata konsumsi ikan per-tahun meningkat sebesar 13,94% yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk Jawa Tengah yang tidak sebanding dengan peningkatan produksi perikanan Jawa Tengah. Sasaran konsumsi ikan bagi rata-rata penduduk Jawa Tengah yang ingin dicapai pada Tahun 2008 adalah sebesar 15,00 kg/kapita/tahun, sedangkan realisasinya tercapai sebesar 15,83 kg/kapita/tahun, sehingga pencapaian sarannya sebesar 105,53%.

Perkembangan konsumsi ikan antara sasaran dan realisasi dimana sasaran yang ditetapkan/ dicanangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 30. Sasaran Dan Pencapaian Konsumsi Ikan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008

No.	Uraian	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Sasaran	12,70	13,00	13,50	14,00	15,00
2.	Pencapaian	9,99	9,47	13,76	13,32	15,83
	Pencapaian Sasaran (%)	78,66	72,85	101,93	95,14	105,53

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng



PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHANNYA

1. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Masih Sangat Terbatas

Sarana dan prasarana yang merupakan unsur penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah, pada saat ini kondisinya masih sangat terbatas, sehingga sulit mengakomodasi perkembangan dan kemajuan perikanan.

Di bidang sarana penangkapan ikan di laut, meskipun motorisasi dan modernisasi armada perikanan laut berkembang cukup pesat, tetapi sebagian terbesar armada perikanan yang ada, yakni sekitar 85% adalah motor tempel, 12% kapal motor, dan 3% perahu tanpa motor. Kondisi yang demikian ini menunjukkan bahwa armada perikanan laut yang ada masih didominasi oleh motor tempel yang jangkauannya sangat terbatas, yaitu masih berkisar pada perairan pantai yang padat tangkap. Untuk kapal motor yang ukurannya besar, salah satu masalah yang dihadapi adalahnya yang berkeitan dengan pengadaannya. Sementara itu, perairan lepas pantai dan ZEEI di Selatan Jawa Tengah belum banyak dimanfaatkan.

Khusus dalam kaitannya dengan pemanfaatan ZEEI, upaya yang telah dilaksanakan adalah mendorong perusahaan swasta nasional dan perusahaan patungan guna menanamkan investasinya, belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Keadaan tersebut tidak lepas dari besarnya modal dan tingginya resiko serta penguasaan teknologi serta penguasaan teknologi serta ketrampilan yang diperlukan, sehingga masih perlu adanya rintisan secara bertahap.

2. Terbatasnya Fasilitas Prasarana Pelabuhan Perikanan atau Pusat Pendaratan Ikan

Prasarana pelabuhan perikanan atau Pusat Pendaratan Ikan (PPI), yang merupakan pusat kegiatan nelayan dan perikanan, fasilitasnya masih terbatas, dengan kendala utamanya adalah terjadinya pendangkalan di muara sungai, sehingga menghambat keluar masuknya kapal-kapal ikan ke Pelabuhan Perikanan dan PPI. Disamping itu kebutuhan air tawar untuk pencucian ikan dan rantai lelang juga amat terbatas.

Untuk mengatasi hal tersebut, walaupun sangat terbatas, telah diupayakan pendanaan baik melalui APBD Provinsi maupun APBN dan Pinjaman Luar Negeri (PLN), disamping diupayakan penanganannya melalui dukungan sektor lainnya.

3. Sulitnya Memperoleh BAP (Bahan Alat Perikanan)

Lebih kurang 86% nelayan di Jawa Tengah menggunakan alat tangkap yang menggunakan bahan jaring, dan 14% lainnya memerlukan bahan lain di luar bahan jaring. Akan tetapi bahan jaring tersebut sangat sulit diperoleh di wilayah Jawa Tengah, padahal kebutuhan bahan jaring merupakan prioritas utama bagi nelayan disamping adanya armada penangkapan.

Untuk memenuhi BAP dimaksud, upaya yang telah dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada investor untuk mendirikan perusahaan jaring di Jawa tengah, disamping bahan-bahan lainnya seperti mata pancing, senar, dan tali temali.

4. Terbatasnya Fasilitas Balai Benih Ikan

Dibidang perikanan budidaya, kondisi fasilitas di balai-balai benih ikan yang ada masih sangat memprihatinkan, sehingga produksi benihnya juga tidak optimal, optimal, sementara itu jumlah dan jenis induk yang ada

juga sangat terbatas, bahkan banyak yang sudah afkir. Kondisi yang demikian ini jelas menghambat perkembangan perikanan budidaya air tawar.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka disamping dilakukan peremajaan induk-induk ikan yang ada, juga dilakukan perbaikan kolam-kolam pemijahan dan perbaikan saluran-saluran air, disamping meningkatkan sumber daya manusianya melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan di bidang perbenihan dan pembudidayaan ikan.

5. Banyaknya Komoditas Yang Diekspor Dari Luar Jawa Tengah

Banyak komoditas hasil perikanan Jawa Tengah yang diekspor dari luar Jawa Tengah, seperti melalui pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dan Tanjung Perak Surabaya, yang menurut sebagian besar pengusaha ternyata lebih menguntungkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan pelayaran untuk melengkapi diri dengan kontainer pendingin dengan jumlah yang memadai.

6. Makin Berkurangnya Populasi Ikan di Perairan Pantai Laut Jawa

Makin berkurangnya populasi ikan di perairan pantai Laut Jawa, yang ditengarai dengan makin jauhnya daerah penangkapan ikan bagi nelayan Jawa Tengah saat ini telah mencapai Kepulauan Natuna, Laut Sulawesi, dan sebagainya.

Upaya yang telah dilakukan adalah selain mendorong nelayan untuk memanfaatkan perairan lepas pantai, juga telah diupayakan dibuatkan daerah *fishing ground* baru dengan rumpon ataupun terumbu karang buatan. Disamping itu, telah dilakukan pula pengiriman peta-peta hasil pantauan satelit yang menunjukkan gerombolan-gerombolan ikan kepada

semua daerah pantai di Jawa Tengah untuk diteruskan kepada nelayan, sehingga mereka dapat menuju sasaran *fishing ground* yang telah diketahui pada peta dimaksud.

7. Rusaknya Hutan Bakau

Rusaknya hutan bakau serta sulitnya menumbuhkan kembali hutan bakau tersebut, padahal hutan bakau diyakini sebagai *spawning ground*, *feeding ground*, dan *nursery ground* di daerah muara sungai dengan menanam bibit-bibit bakau, disamping itu juga dilakukan penanaman bakau pada pematang-pematang saluran tambak primer.

8. Terjadinya Pencemaran dan Gulma Air

Terjadinya pencemaran dan gulma air yang tidak terkendali menyebabkan mutu lingkungan cenderung menurun, disamping terjadinya perebutan dan tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan oleh berbagai kegiatan pembangunan.

Upaya yang dilakukan dalam menangani pencemaran adalah dengan kerja sama lintas sektor disamping pembinaan terhadap industri perikanan, selain itu dalam mengendalikan gulma air di perairan waduk, secara bertahap telah dilaksanakan penebaran benih ikan-ikan dewasa pemakan gulma air.

9. Sering Terjadinya Pelanggaran Penangkapan Ikan dan Pencurian Ikan Oleh Nelayan Asing

Berkembangnya alat tangkap jaring arad, jaring cotok, atau jaring Petek yang merupakan modifikasi nelayan tradisional yang menjurus pada jenis alat tangkap terlarang (sejenis Trawl) mengakibatkan sering terjadinya bentrok antar nelayan, baik di laut saat menangkap ikan yang terus berlanjut dengan bentrok di darat. Hal ini mengakibatkan nelayan tradisional pada daerah bentrok tidak berani melaut, sehingga sedikit

banyak mempengaruhi aktivitas di darat. Disamping itu, terjadinya pelanggaran penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, stroom/ listrik berakibat rusaknya habitat ikan di perairan dimana bahan tersebut digunakan. Di sisi lain, banyak nelayan yang memergoki kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Pantai Utara Jawa Tengah yang disinyalir menggunakan peralatan tangkap ikan yang sangat canggih disamping mempunyai kecepatan yang luar biasa , telah menguras sumber daya perikanan yang ada.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membentuk kelompok-kelompok SISWASMAS (Sistem Pengawasan Masyarakat) di daerah-daerah pantai, pembinaan dan penyuluhan terhadap nelayan, serta melakukan operasi pengawasan penangkapan ikan di laut maupun patroli bersama dengan POKGASKAMLA (Kelompok Tugas Keamanan Laut), terutama di Pantai Utara Jawa Tengah.

10. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Serta Keterampilan Pembudidaya Ikan dan Nelayan

Dalam hubungannya dengan SDM kelautan dan perikanan, masalah yang dihadapi antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan serta keterampilan nelayan, dan lemahnya permodalan serta manajemen usaha. Rendahnya tingkat pendidikan antara lain menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas yang dicapai. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang ada belum merata, baik dilihat dari penyebarannya antar wilayah maupun antar tingkat pendidikannya.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan pembudidaya ikan dan nelayan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan, baik di bidang budidaya ikan, penangkapan, pasca panen, maupun pendidikan dan pelatihan keterampilan lainnya.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan operasional dan program kerja Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 telah disesuaikan dengan visi dan misi yang diembannya, dimana dalam implementasinya disesuaikan dengan Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Program Depatemen Kelautan dan Perikanan
2. Produksi perikanan Jawa Tengah Tahun 2004-2008 mengalami penurunan 1,76%/thn, dengan kenaikan nilai sebesar 4,99%/thn.
3. Kontribusi perikanan tangkap terhadap total produksi adalah sebesar 59,58%, sedangkan kontribusi perikanan budidaya terhadap total produksi adalah sebesar 40,42%.
4. Volume ekspor hasil perikanan Jawa Tengah Tahun 2008 sebesar 17.794.068,77 kg dengan nilai ekspor sebesar 71.762.355,41 USD
5. Pendapatan Asli Daerah sektor kelautan dan perikanan Jawa Tengah Tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp.16.135.944.000,00, terealisasi sebesar Rp.16.938.108.110,00 (104,97%)

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Sangat diperlukan dukungan operasional kerja, baik untuk kelancaran informasi antar daerah, antar kabupaten/ kota dengan provinsi,

maupun antar kabupaten/ kota dengan pusat, serta dukungan operasional bagi petugas teknis di lapangan

2. Dengan digabungnya sektor kelautan dan perikanan di kabupaten/ kota dengan sektor lainnya serta terbatasnya kegiatan-kegiatan yang dialokasikan, akan mengakibatkan semakin tenggelamnya sektor kelautan dan perikanan di banyak daerah. Apabila hal ini tidak segera ditangani dengan bijak dan tidak adanya kebijaksanaan penganggaran proyek dari pusat, maka dalam waktu yang tidak relatif lama, dinas/ kantor/ bidang yang mengurus sektor kelautan dan perikanan hanya akan tinggal nama. Hal ini perlu dimaklumi, mengingat salah satu tolok ukurnya adalah kemampuan untuk memberikan sumbangan/ pendapatan daerah, padahal sebenarnya dengan keterbatasan potensi di daerah-daerah pedalaman ada secercah harapan untuk tetap eksisnya sektor kelautan dan perikanan, yaitu dengan terobosan anggaran yang digunakan untuk menggali dan meningkatkan potensi yang tersedia, atau mengimpor potensi dari daerah lain yang mampu untuk dikembangkan dan mampu untuk dipasarkan
3. Kegiatan yang sifatnya penting, akan tetapi dalam implementasinya ternyata pendanaannya sangat terbatas, seyogyanya tidak perlu dilaksanakan. Hal ini selain kurang mengena sasaran, juga tidak akan efektif, sehingga dapat merupakan pemborosan.

ENUTUP

Disadari bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari harapan yang kita inginkan bersama, karena masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunannya. Walaupun demikian, apa yang tertuang didalamnya telah mampu memberikan sedikit gambaran pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 serta hasil yang telah dicapai.

Laporan Tahunan ini diharapkan pula dapat memberikan informasi bagi para pelaksana kegiatan di daerah dan di pusat, disamping sebagai acuan dalam perencanaan di tahun-tahun yang akan datang.